



3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makan minum rapat
 - j) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Pengelolaan dokumen SKPD
 - l) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Pengkajian kompetensi kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
 - c) Penyusunan perencanaan SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - b) Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan



- c) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - d) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - f) Kerja sama pengelolaan persampahan
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- a) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA)
 - b) Pemantauan kualitas lingkungan
 - c) Pengkajian dampak lingkungan
 - d) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan/PROPER)
 - e) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH
 - f) Koordinasi penyusunan AMDAL
 - g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - h) Fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup
 - i) Pelayanan perijinan bidang lingkungan
 - j) Penyusunan strategi sanitasi perkotaan
 - k) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan perkotaan
 - l) Penyusunan KLHS RDTR Kawasan perdesaan
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
- a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 - b) Pengendalian dampak perubahan iklim
 - c) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
 - d) Pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan SDA
 - e) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
 - f) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem



- g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - b) Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - c) Pengendalian pencemaran industri skala kecil dan rumah tangga
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - a) Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - a) Penataan ruang terbuka hijau
 - b) Pemeliharaan ruang terbuka hijau
 - c) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan
 - b) Pembayaran jasa langganan listrik, air, telpon 12 bulan.
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan
 - d) Pengelolaan kebersihan kantor 12 bulan dan ketersediaan alat dan bahan kebersihan 10 jenis
 - e) Pemeliharaan komputer 7 unit
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 34 jenis
 - g) Penyediaan barang cetakan 6 jenis dan penggandaan 16.283 lembar
 - h) Penyediaan komponen listrik 4 jenis
 - i) Fasilitasi rapat dan tamu 12 kali



- j) Fasilitasi konsultasi 11 kali.
- k) Pengelolaan arsip 2 jenis
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor
 - b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 5 unit dan roda empat 3 unit
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 dokumen, penyusunan daftar nominatif kepegawaian 1 dokumen, Penyusunan LP2P 25 orang, KP4 25 orang, DP3 25 orang, pelayanan pengurusan pensiun 1 orang, kenaikan gaji berkala 12 orang, dan kenaikan pangkat 2 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Laporan bulanan dan tahunan SKPD 65 buku serta LAKIP 10 buku
 - b) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 12 laporan
 - c) Rencana kerja SKPD 10 buku, RKA SKPD 10 buku, DPA SKPD 10 buku, DPPA SKPD 10 buku dan perubahan rencana kerja SPD 10 buku
 - d) Profil data SKPD 10 buku
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a) Tong sampah pilah 99 unit, kompartemen 242 unit, komposter 275 buah, mesin pencacah sampah organik 5 unit, mesin pencacah sampah plastik 3 unit, transfer depo Ambarketawang Gamping 1 unit, dan tempat pembuangan sampah sementara 1 unit
 - b) Draft Peraturan Bupati Sleman tentang Kerja Sama Pengelolaan Sampah 1 paket
 - c) Pelayanan sampah permukiman dan niaga 260 pelanggan, penyapuan jalan protokol 28 lokasi, pembinaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) 2 lokasi, revitalisasi truk pembuangan 1 lumpsom, pengelolaan sampah pasar sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 8 UPT
 - d) Sosialisasi pengelolaan sampah 20 kali



-
- e) Fasilitasi dan pembinaan sampah mandiri 25 kelompok, pertemuan jejaring pengelola sampah 2 kali, peralatan penanganan sampah sebagai stimulan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*) 606 buah, gerakan bersih pasar dan sarana prasarana kebersihan pasar 15 kali, kerja bakti dengan pedagang di 14 pasar di 7 UPT
 - f) Laporan kerja sama pengelolaan persampahan 10 buku
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- a) Pembinaan dan pemantauan kebersihan kota di 2 pasar, 7 sekolah, 2 terminal, 12 ruas jalan, 4 perumahan, 8 sungai, 2 puskesmas, 1 rumah sakit, pemeliharaan sungai 9 lokasi, koordinasi dan fasilitasi adipura 37 kali, evaluasi adipura 1 kali, sosialisasi kepada masyarakat 32 kali, pembinaan dan pemantauan kebersihan dan keteduhan kota 6 kali, penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 5 kali
 - b) Pengujian dan pemeriksaan kualitas 25 titik air bersih, 10 titik mata air, 60 titik badan air, 12 titik kualitas tanah pertanian, 26 titik udara ambien, emisi cerobong di 10 usaha/kegiatan, dan air limbah di 12 usaha/kegiatan, pembinaan laboratorium 2 kali, dan pengadaan reagen 1 paket
 - c) Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan yang terdiri dari UKL-UPL/DPL 65 buah, SPPL 2.205 buah, pelayanan ijin lingkungan 6 buah, pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan 30 usaha/kegiatan, bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan 1 kali, UKL-UPL Embung Mlakan 1 dokumen, dan UKL-UPL pengembangan kandang ternak Sarihusada 2 unit
 - d) Sosialisasi pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2 kali, pembinaan 13 usaha/kegiatan peserta PROPER

- e) Pembinaan masyarakat sepanjang aliran sungai di 1 kali, gerakan kebersihan sungai di 10 lokasi, fasilitasi kegiatan jejaring masyarakat peduli sungai di 1 alur sungai
 - f) Evaluasi kegiatan/dokumen AMDAL 15 dokumen
 - g) Pembinaan pengelolaan limbah Industri Skala Kecil (ISK) 2 kali, pembuatan 1 jejaring pengelola Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), fasilitasi kegiatan jejaring pengelola IPAL 28 lokasi dan pengujian kualitas air IPAL ISK 12 lokasi
 - h) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 31 kasus
 - i) Pelayanan ijin pembuangan air limbah 12 pemohon, pelayanan permohonan surat keterangan kelayakan teknis atau ijin penyimpanan sementara limbah B3 20 pemohon
 - j) Fasilitasi kegiatan sanitasi Kabupaten Sleman 10 kali, dan review strategi sanitasi Kabupaten 1 Kecamatan
 - k) Penyusunan 15 buku dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Gamping
 - l) Penyusunan 15 buku dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Ngemplak
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
- a) Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 255 unit, penyediaan alat bor biopori 440 unit, sosialisasi 12 kali, pengadaan kendaraan roda tiga 1 unit, bibit tanaman 6.000 batang, pelaksanaan konservasi dan pengendalian kerusakan 80 mata air, pengangkatan sedimen bendung 17 lokasi
 - b) Inventarisasi gas rumah kaca 25 buku dan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RADPI) 25 buku
 - c) Pengendalian dan pengamatan hama/penyakit pada tanaman hutan 14 kelompok, obat-obatan pengendali hama penyakit 1 paket, penyediaan alat pengendalian hama/penyakit tanaman hutan 4 hutan
 - d) Monitoring dan pengendalian pemanfaatan air 45 kali



- e) Penyusunan laporan menuju Indonesia Hijau 10 buku, peningkatan kualitas alokasi air 9 dl
 - f) Pembinaan masyarakat pemanfaat Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 1 kali, dan inventarisasi pelaksanaan penghijauan, kerusakan lahan/lahan kritis 10 buku
 - g) Pembinaan kepada pemerhati lingkungan hidup pada rangkaian Hari Lingkungan Hidup 12 prestator, pelaksanaan lomba cerdas cermat 10 prestator, pengadaan bibit 3.000 batang, pelaksanaan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) 1 kali
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Pembinaan lingkungan hidup di 9 sekolah dan 6 pondok pesantren, pelaksanaan keikutsertaan pada pameran pembangunan 1 kali, dan penyusunan kapita selekta 200 buku
 - b) Penyusunan draft Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) terdiri dari buku laporan 1 draft dan buku kumpulan data 1 draft, penyusunan kumpulan data SLHD 2012 30 buku dan penyusunan laporan SLHD 2012 30 buku
 - c) Pembinaan pengelolaan limbah ISK 1 kali, pelaksanaan sosialisasi produksi bersih rumah tangga 1 kali, dan inventarisasi sumber pencemar 1 buku
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- a) Lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dan uji petik emisi kendaraan bermotor 1 kali
 - b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1 paket
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- a) Pembangunan taman kota 4 lokasi dan penyusunan dokumen perencanaan 3 lokasi
 - b) Pemeliharaan taman dan lahan serta lahan terbuka 62 lokasi, pemeliharaan tanaman perindang jalan 20.150 tanaman
 - c) Pengendalian penebangan perindang jalan 20 lokasi

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.9. Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012-2013

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	2012		2013	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pencegahan Pencemaran Air Jumlah usaha/kegiatan yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	80,00%	100%	100%	100%
2.	Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	80,00%	100%	100%	100%
3	Penyedia Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi Biomassa yang diinformasikan	80,00%	94,12%	100%	100%
4	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	80,00%	100%	90%	100%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1) Pencegahan pencemaran air

Pemantauan dan pengawasan terhadap 5 (lima) usaha/kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai target pencapaian SPM diperoleh

hasil 5 (lima) usaha/kegiatan (100%) yang dipantau dan diawasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Adapun usaha/kegiatan tersebut adalah:

- a) PT.GE Lighting Indonesia
- b) Hotel Hyatt Regency
- c) PT. Mirota KSM
- d) RSUP Dr. Sardjito
- e) Percetakan Kanisius

2) Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 4 (empat) usaha/kegiatan. Sedangkan jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 4 (empat) usaha/kegiatan (100%) yaitu:

- a) PC GKBI Medari
- b) PT. GE Lighting Indonesia
- c) PT. Westa Pusaka Kusuma
- d) PT. Primiissima

3) Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Perhitungan capaian target penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa tidak sepenuhnya didasarkan pada Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak tahun 2004 telah dilakukan pengujian sampel tanah pertanian di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman (100%) yang meliputi 54 desa, disamping itu Pemerintah Kabupaten Sleman belum menetapkan status kerusakan terhadap tanah pertanian yang ada.

4) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Seluruh aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup pada tahun 2013 telah ditindaklanjuti. Dari 31 (tiga puluh satu) jumlah pengaduan yang diterima, 23 (dua puluh tiga) kasus pengaduan statusnya selesai dan 8 (delapan) kasus statusnya masih dalam pengawasan/pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2013 memperoleh penghargaan Piala Adipura berdasarkan penilaian fisik dan non fisik memperoleh nilai 74,15. Pencapaian ini merupakan puncak dari usaha pencapaian pada tahun 2012 yang telah menerima penghargaan Piagam ADIPURA untuk kategori Kota Sedang berdasarkan penilaian fisik dan non fisik tahun 2011/2012 sebesar 73,27 dan penilaian tahun 2011 sebesar 68,53. Pencapaian ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan terutama melalui pembinaan dan pemantauan kebersihan kota di lokasi-lokasi titik pantau meliputi pasar, sekolahan, terminal, ruas jalan (baik arteri maupun kolektor), perumahan, Puskemas, Rumah Sakit, dan perairan umum (sungai).

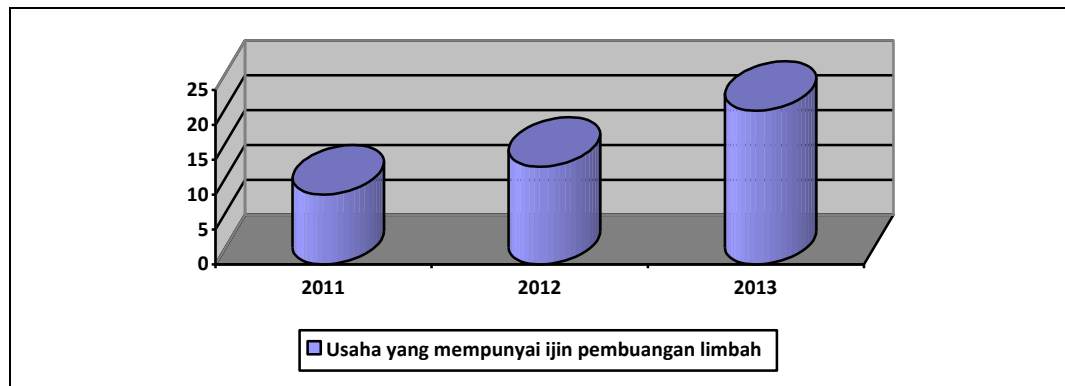
Tabel 3.10. Usaha/Kegiatan yang Mempunyai IPAL

No	Jenis Usaha	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Industri	24	25	25
2	Hotel	20	26	30
3	Rumah Sakit	15	16	16
4	Komunal Rumah Tangga	13	18	38
5	Limbah Tahu	9	9	9
6	Rumah Makan/Restoran	12	13	13
7	Plaza/Pasar Swalayan	4	4	5
8	Kantor/Perguruan Tinggi	2	2	2
Total		99	113	138

Sumber Data: Kantor Lingkungan Hidup

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap usaha/kegiatan yang mempunyai IPAL pada tahun 2013 sebanyak 138 usaha/kegiatan naik 22,12% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 113 usaha/kegiatan. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari sektor komunal rumah tangga dan pelaku perhotelan yang telah mempunyai kesadaran untuk membuat saluran IPAL.

Grafik 3.11. Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Ijin Pembuangan Limbah



Sumber Data: Kantor Lingkungan Hidup

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan usaha/kegiatan yang mempunyai ijin pembuangan limbah sebesar 57,14% jika dibandingkan dengan tahun 2012, kesadaran pelaku usaha terhadap lingkungan terutama pembuangan limbah telah meningkat tiap tahun dengan gencarnya sosialisasi, pemantauan dan pembinaan lingkungan secara intensif oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dari hasil pemantauan kualitas lingkungan tahun 2013 dapat diketahui kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- 1) Dari 25 titik lokasi di Kecamatan Mlati dan Depok, air bersih yang diuji menunjukkan hasil bahwa secara kimia 100% air telah memenuhi persyaratan air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 walaupun secara bakteriologi masih tercemar karena sistem sanitasi masyarakat yang masih harus diperbaiki
- 2) Dari 10 lokasi mata air titik pantau yang diuji menunjukkan bahwa secara kimia 100% air memenuhi persyaratan walaupun secara bakteriologi masih tercemar akibat mata air yang di sampling kebanyakan berada dekat dengan aktivitas manusia seperti di persawahan dan perumahan

- 3) Hasil pengujian kualitas udara pengambilan sampel sesaat (satu jam) di 26 titik lokasi pantau diketahui bahwa kualitas udara ambien di semua lokasi masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambient sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002
- 4) Hasil pengujian kualitas tanah pertanian dengan 12 titik lokasi sampling dapat diketahui bahwa tanah pertanian belum memenuhi kriteria baku kerusakan tanah karena rendahnya andungan koloid tanah (lempung) bukan disebabkan terangkatnya koloid tanah oleh erosi air tetapi merupakan faktor bawaan dari alam dan tidak bisa dikatakan kritis
- 5) Hasil pengujian kualitas cerobong pada 10 usaha/kegiatan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa 10 usaha tersebut telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan pada Keputusan Gubernur Nomor 169 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.11. Jumlah Dokumen Lingkungan yang Direkomendasikan dan Disahkan

No.	Uraian	Jumlah Dokumen Lingkungan		
		2011	2012	2013
1	Usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup			
	a) Dokumen AMDAL	0	2	15
	b) Dokumen UKL-UPL	102	67	87
	c) SPPL	1.677	2.002	2.205
2	Usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup			
	a) Dokumen AMDAL	0	1	6
	b) Dokumen UKL-UPL	72	60	68
	c) SPPL	1.677	2.002	2.205

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 sebanyak 40% pelaku usaha telah mempunyai dokumen AMDAL, 78% mempunyai dokumen UKL-UPL dan 100% memiliki SPPL.

Prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2013 bidang lingkungan hidup adalah :

- 1) Penghargaan Piala ADIPURA kategori Kota Sedang atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman
- 2) Penghargaan Sekolah ADIWIYATA MANDIRI Nasional atas nama SDN Banyuurip 2 Turi
- 3) Penghargaan Sekolah ADIWIYATA MANDIRI atas nama SD Kanisius Kadirojo Kalasan
- 4) Juara I Tingkat DIY Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan atas nama Pondok Pesantren Hidayatullah
- 5) Juara I Tingkat DIY Program Kampung Hijau atas nama Pemerintah Desa Lumbungrejo
- 6) Juara II Tingkat DIY Kategori Perintis Lingkungan atas nama Winarto, warga Karanggawang Girikerto Turi
- 7) Juara III Tingkat DIY kategori Pembina Lingkungan atas nama H. Habib Habudin, warga Kejambon Lor Sindumartani Ngemplak
- 8) Juara III Tingkat DIY Kategori Pengabdian Lingkungan atas nama Muslikah, AMKL Sanitarian Puskesmas Sleman

b. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.



c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup berjumlah 24 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp10.341.461.140,00 realisasi Rp9.666.471.776,00 atau 93,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp126.182.500,00 realisasi Rp107.902.246,00 atau 85,51%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp164.540.000,00 realisasi Rp161.556.420,00 atau 98,19%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp13.220.000,00 realisasi Rp12.899.100,00 atau 97,57%.
- 4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp81.960.000,00 realisasi Rp80.834.700,00 atau 98,63%.
- 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan, anggaran sebesar Rp3.700.054.540,00 realisasi Rp3.343.166.955,00 atau 90,35%.
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp1.115.689.000,00 realisasi Rp1.074.171.955,00 atau 96,28%.
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp3.035.138.100,00 realisasi Rp2.884.457.100,00 atau 95,04%.
- 8) Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp168.968.000,00 realisasi Rp163.411.050,00 atau 96,71%.

- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar Rp42.960.000,00 realisasi Rp42.884.400,00 atau 99,82%.
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar Rp1.892.749.000,00 realisasi Rp1.795.187.850,00 atau 94,85%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan lingkungan hidup diawali dengan identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut melibatkan LSM lingkungan, Pusat Studi Lingkungan UGM dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional Jawa-Madura.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagaimana lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Dari 60 titik pantau dari 11 sungai pantau Prokasih (Sungai Winongo, Code, Gajah Wong, Bedog, Konteng, Opak, Tepus, Kuning, Blotan, Kruwet, Progo) untuk sungai Kelas I (di bagian hulu dan tengah) kebanyaan masuk dalam kategori tercemar berat dengan parameter logam berat (timbal dan tembaga), *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, dan Residu Tersuspensi/*Total Suspended Solid (TSS)*. Solusi yang ditempuh melakukan revitalisasi sungai dan pemantauan serta pembinaan secara berkala.
- 2) Belum terselesaikannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman belum mempunyai alat untuk dapat menertibkan usaha-usaha/kegiatan

yang melanggar undang-undang lingkungan hidup. Solusi yang dilakukan mengintensifkan pembahasan raperda tersebut.

- 3) Belum ada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Solusi yang dilakukan mengusulkan sinkronisasi peraturan tentang lingkungan hidup.
- 4) Pemilahan sampah mandiri oleh masyarakat menjadi 5 atau 3 kategori masih belum efektif dan dianggap menyulitkan masyarakat. Solusi yang dilakukan pemilahan sampah disederhanakan menjadi 2 kategori yaitu sampah organik dan anorganik, karena untuk kedepan, pengelolaan TPA Piyungan akan menggunakan 2 pilahan sampah yaitu sampah organik dan anorganik, untuk diolah menjadi energi.

4. Urusan Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor



- m) Penyediaan jasa administrasi kantor
- n) Pengelolaan dokumen SKPD
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin /berkala meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbat Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar, lokakarya.
 - b) Pengkajian kompetensi kepegawaian
 - c) Pengelolaan dokumen kepegawaian.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
 - e) Penyusunan profil data SKPD
 - f) Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a) Perencanaan pembangunan jembatan
 - b) Peningkatan jalan
 - c) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong
- 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
 - a) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
 - b) Pemeliharaan rutin saluran drainase
- 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - b) Pemeliharaan rutin jalan
 - c) Pemeliharaan rutin jembatan
 - d) Pengadaan Aspal Swadaya
- 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan melalui penyusunan sistem informasi/data base jalan



-
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - a) Operasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - b) Operasional/pemeliharaan alat ukur dan bahan laboratorium
 - 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - b) Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
 - c) Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
 - d) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
 - e) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
 - f) Pembinaan perijinan bidang irigasi
 - g) Pemutakhiran data jaringan irigasi
 - h) Peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi (WISMP)
 - i) Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
 - 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
 - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
 - c) Pembinaan dan pengelolaan air baku di kawasan rawan kekeringan
 - 12) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
 - a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
 - b) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya lainnya
 - d) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya
 - e) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak sungai
 - 13) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong melalui Pembangunan jalan



-
- 14) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - a) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
 - b) Fasilitas pembinaan teknis pengelolaan air limbah
 - c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
 - d) Perencanaan jaringan air limbah
 - e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/minum dan reservoir
 - 15) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan
 - a) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - c) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
 - d) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - 16) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
 - a) Perencanaan Gedung
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan dan desa
 - d) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum
 - e) Pembinaan teknis pembangunan

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pekerjaan umum adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pelayanan jasa surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
 - b) Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan 12 bulan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan



- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan
- i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- j) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan
- k) Fasilitas perjalanan dinas 12 bulan
- l) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
- m) Penyediaan jasa administrasi kantor 12 bulan
- n) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan bangunan/gedung kantor 4 unit
 - b) Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
 - c) Pemeliharaan meubelair 12 bulan
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Pengelolaan administrasi 357 orang pegawai
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Laporan bulanan, laporan tahunan, LAKIP, Pendukung LPPD, pendukung LPKPJ 108 buku
 - b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 24 buku
 - c) Dokumen RKA/DPA, RKPA/DPPA SKPD, dan Rencana Kerja SKPD 56 buku
 - d) Penyusunan laporan monitoring kegiatan dan evaluasi 10 buku
 - e) Penyusunan profil data SKPD 25 buku
 - f) Pelayanan IUJK 79 izin
- 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a) DED Jembatan Rejodani, Jembatan Merah, Jembatan Mrisen, Jembatan Pendulan, Jembatan Kendangan, Jembatan Nganti, Jembatan Glondong dan Site Plan Jembatan Panggung
 - b) Peningkatan jalan di Kecamatan Depok, Prambanan, Sleman, Ngaglik, sepanjang 9,80 km ruas Jalan Ambarukmo-Perumnas (Ngringin-Ambarukmo), Jalan Jali-Kalinongko (Gayamharjo-



- Kalingongko Kidul), Jalan Nambongan-Cangkring (Nambongan-Klumpit), Jalan Nambongan-Sompokan (Nambongan-Kregolan), Jalan Krpyak Medari-Tegal (Krpyak-Kendangan), Jalan Pangukan-Getas (Getas-Pangukan), Jalan Nandan-Lojajar (Krikilan-Lojajar), Jalan Kepitu-Rejodani (Rejodani-Mancasan), Jalan Pencarsari-Turen
- c) Peningkatan Jembatan 13 buah dan 8 gorong-gorong pada ruas-ruas jalan kabupaten yaitu Jembatan Kragilan, Pereng, Pojok, Umbulgede 1, Watugajah, Cokrowijayan, Kembangarum, Bunder, Celungan 2, Bayen, Kwarasan, Beteng, Kalimati dan Gorong-gorong Patukan, Celungan, Jurugan, Cangkring, Plumbon, Gendeng, Purwobinangun dan Patukan
- 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
- a) Pembangunan Drainase 31 lokasi (Jl. Kepitu-Kadisobo, Jl. Letkol Subadri, Jl. Beran-Balong, Jl. Kabupaten Purwomartani, Jl. Purwobinangun, SMKN Kalasan, Jl. Plosokuning Raya. Barat Pondok Pesantren Candi Dukuh, Sawahan, Cambahan, Karangtengah, Perum Jitengan, Lapangan Daratan I, Lapangan Kebonagung, Jl. Krikilan Berbah, Jl. Sumber Kulon, Jl. Selatan Kerten Jogotirto, Jl. Kembangan II, Sermo Tegaldrono, Depan Puskesmas Seyegan, Gendengan-Grogol, Jl. Geblok-Kaliadem, Dusun Bandaran, Jl. Babarsari, Jl. Affandi, Tegalsari Umbulmartani, Ngemplak II, Krodan, Karanggayam, Murangan-Ngablak, Tambakrejo-Sariharjo), pemasangan plat penutup saluran drainase 3 lokasi (saluran drainase Godean-Nulis, Jombor-Jongkang, Kadirojo 1) dan pembuatan sumur resapan
- b) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 10.000 m'
- 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- a) Rehabilitasi Jalan sepanjang 17,50 km meliputi 11 ruas jalan kabupaten yaitu : Jl. Wadas-Cebongan (2,50km), Jl. Gorongan-Gowok (1,50 km), Jl. Tlukan-Kadisoko (2,15 km), Jl. Tegalsari-Berbah (2,60 km), Jl. Beran Lor-Beran (1,10 km), Jl. Kenteng-



- Besole (1,20 km), Jl. Jambon–Biru (0,50 km), Jl. Menulis–Nglampis (1,50 km), Jl. Temulawak–Bangunkerto (1,30 km), Jl. Kadisobo–Kaweden (0,50 km), Jl. Gandok–Plosokuning (0,90 km); Pengadaan konsultan perencana (2 paket); Pengadaan konsultan pengawas (2 paket); Rehabilitasi talud 8 lokasi, yaitu : Jl. Genitem–Klaci, Jl. Josari–Kembangan, Jl. Rejodani–Mancasan, Jl. Cebongan–Ngangkrik, Jl. Bedoyo–Balong, Jl. Losari–Gayamharjo, Jl. Blembem–Kaliwangi, Jl. Somokaton–Banyuurip; dan pemeliharaan jalan kompleks ibukota
- b) Pemeliharaan jalan aspal kabupaten 354 km
 - c) Pemeliharaan jembatan 15 buah dan Gorong-gorong 30 buah
 - d) Bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat 2.924 drum
- 8) Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan terealisasi data base kondisi jalan dan jembatan 1 dokumen
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- a) Pemeliharaan peralatan konstruksi unit, pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, pemeliharaan peralatan angkutan 4 unit dan Pemeliharaan *Excavator* 2 unit, pemeliharaan *Stone Crusher* 2 unit, pemeliharaan AMP Mini 1 unit
 - b) Operasional alat-alat ukur dan bahan laboratorium 28 unit dan pengadaan *extractor asphalt* 1 unit
- 10) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
- a) Rehabilitasi 47 buah Daerah Irigasi (DI)
 - b) Rehabilitasi/pemeliharaan Petani Pemakai Air 9 angkatan
 - c) Pembangunan bendung dan saluran 78 buah
 - d) Operasional dan pemeliharaan 20 buah bendung, 100 km saluran, dan 9 buah pintu air
 - e) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif 20 buah Daerah Irigasi (DI)
 - f) Pemrosesan 12 rekomendasi perijinan bidang irigasi



- g) Pemutakhiran 50 data DI dan *updating* data prasarana pengairan yang terdiri 50 DI dan 50 buah jaringan irigasi
 - h) Peningkatan kinerja lembaga jaringan irigasi desa 34 Lembaga Pengelola Irigasi (LPI), buku program kerja WISMP 15 buah 2013 dan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) 17 lokasi
 - i) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - j) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 5 lokasi
 - k) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan 2 lokasi meliputi Mata Air Gamplong dan Mata Air Karang Bajang
 - l) Pembinaan dan pengelolaan air bersih 2 kali; droping air bersih 100 kali; pengadaan sumur/jaringan irigasi 3 paket
- 11) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air
 - b) Pemeliharaan embung dan bangunan penampung air, meliputi Embung Jering Sidorejo Godean, Embung Tirta Artha Tridadi Sleman
 - c) Pembentukan organisasi pengelola embung di 2 lokasi: Embung Serut dan Embung Krapyak Barepan
 - d) Perencanaan Embung
 - e) Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Sungai Macan Sonoboyo Banyurejo Tempel dan Sungai Konteng Balecatur Gamping
- 12) Program Pembangunan turap/talud/bronjong 8 lokasi, meliputi talud Gamelan–Sekarsuli Berbah, jalan selatan Koripan Sindumartani Ngemplak, Lapangan olah raga Sindumartani Ngemplak, Karanganyar-Prigen Widodomartani Ngemplak, Jangkang–Klancingan Widodomartani Ngemplak, Jalan Dusun Kenaruhan Donokerto Turi, Jalan Jitar Bandelan Sumberarum Moyudan dan Jalan Padasan Pakembinangun Pakem
- 13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
- a) Pembangunan sambungan air minum 900 unit rumah; pembangunan



jaringan pipa servis di Pogung Kidul 3.454 m dan pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 5 lokasi

- b) Sosialisasi pengelolaan air limbah 10 kali, pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan air limbah 2 kali, pelaksanaan mikro marketing/*Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) 1 lokasi, penarikan retribusi pengolahan limbah cair selama 12 bulan, penyediaan tenaga fasilitator jaringan air limbah 4 orang, operasional kegiatan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)/*Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) 33 lokasi dan operasional program animas 5 lokasi
- c) Pemeliharaan jaringan air limbah yang telah terbangun di 9 lokasi dan penyediaan pegawai harian lepas 4 orang
- d) Perencanaan jaringan air limbah, meliputi penyediaan peta pengelolaan air limbah, penyediaan sistem informasi retribusi pengolahan air limbah dan pemutakhiran data peta jaringan air limbah
- e) Rehabilitasi jaringan air bersih/air minum dan reservoir 17 unit

14) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- a) Pembangunan jalan desa 185 lokasi dan jalan lingkungan konblok 44 lokasi meliputi ruas jalan desa dan jalan lingkungan konblok yang tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Sleman dan 6 Jembatan desa
- b) Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat 20 lokasi; pemetaan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Turi, Ngemplak, Cangkringan dan penyusunan DED Jaringan Air Bersih
- c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih di Kecamatan Tempel, pemasangan tambahan daya listrik untuk keperluan penyedotan air di Majasem Sambirejo Prambanan dan Bleber Sumberharjo Prambanan, pengadaan sambungan rumah 129 unit di Bangunrejo Merdikorejo Tempel, fasilitasi dan pembinaan Perpamdes

15) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

- a) Dokumen perencanaan data gedung-gedung pemerintah daerah

- dan kecamatan, Gedung Nakersos dan Pasar Prambanan tahap 2.
- b) Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 9 paket (Gudang dan Pagar DPKAD, Mushola Kantor Setda dan Akses Difabel, Depo Arsip Kabupaten, Depo Arsip untuk Setda; rehabilitasi Rumah Dinas Pejabat, Garasi dan Gudang SDAEM, Gedung Kantor DPKAD, Halaman Gedung Setda, Gedung UPT Prambanan)
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan dan desa (rehabilitasi Masjid Darojatul Ulya, pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Godean, Kantor Desa Sindumartani Ngemplak, rehabilitasi Aula Desa Wukirharjo, Kantor Desa Sambirejo Prambanan, rehabilitasi Aula Balai Desa Donokerto Turi, Kantor Kecamatan Seyegan, rehabilitasi Kantor Kecamatan Sleman, dan penataan halaman Kecamatan Ngaglik)
 - d) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum 2 paket (rehabilitasi Masjid Agung Sleman, penyempurnaan lapangan tenis indoor)
 - e) Pelayanan pengesahan dokumen konstruksi 100 pemohon

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.12. Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013

No	Jenis pelayanan dasar dan indikator	Target	Batas Waktu	Capaian	
				2012	2013
1	2	3	4	5	6
1	Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat				
	- Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2014	80%	40,14%
	- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	2014	71,3%	72%



1	2	3	4	5	6
2	Jaringan dan ruas jalan				
	- Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100%	2014	100%	100,00%
	- Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	2014	335,67%	203,91%
	- Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2014	50,13%	66,42%
	- Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	2014	50,13%	66,42%
	- Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	50,13%	66,42%
3	Cluster pelayanan air minum				
	- Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan	100%	2014	29,60%	40,14%
4	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)				
	- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	2014	69,77%	81,87%
	- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota	5%	2014	1,77%	2,67%
	- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	2014	13,99%	15,19%
	- Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	2014	30,02%	36,01%
	- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali	50%	2014	43,00%	44,65%
5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan				
	- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2014	38,00%	66,64%



1	2	3	4	5	6
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan				
	- Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/kota	100%	2014	88,92%	134,63%
	- Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota	100%	2014	60%	100%
7	Jasa Konstruksi				
	- Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2014	100%	100%
	- Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	100%	71,43%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Urusan kuantitas prasarana jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum air limbah, gedung pemerintah dan infrastruktur perdesaan. Sesuai Surat Keputusan Bupati No. 105/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Status Jalan Kabupaten, secara fisik panjang jalan kabupaten sepanjang 699,50 km (jalan beraspal sepanjang 691,80 km, jalan kerikil 6,00 km, dan jalan tanah 1,70 km), dengan kondisi baik sepanjang 378,16 km, kondisi sedang sepanjang 172,92 km dan rusak sepanjang 148,43 km. Panjang jalan Kabupaten mengalami penurunan karena ada ruas jalan yang menjadi Jalan Propinsi, ada ruas jalan yang menjadi Jalan Desa. Kondisi jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.13. Kondisi Jalan Kabupaten (kilometer) Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Baik	372,63	394,10	378,16
2.	Sedang	401,49	351,55	172,92
3.	Rusak	286,67	299,11	148,43

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jumlah gorong-gorong tahun 2013 pada ruas jalan Kabupaten sebanyak 2.005 buah. Gorong-gorong dengan kondisi baik 1.903 buah, kondisi sedang 90 buah dan kondisi rusak 7 buah. Jumlah

Gorong-gorong mengalami penurunan karena ruas jalan kabupaten juga menurun. Kondisi saluran irigasi baik primer maupun sekunder pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2012. Saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat dari 327.787m menjadi 329.787 m, sedangkan irigasi sekunder kondisi baik mengalami kenaikan dari 204.000 m menjadi 231.117 m. Kondisi bangunan pengairan secara lengkap pada tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.14. Kondisi Bangunan Pengairan Tahun 2012 dan 2013

No	Jenis	Baik		Sedang		Rusak	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1.	Bendung Permanen (buah)	369	384	385	380	200	190
2.	Bendung SemiPermanen (buah)	145	148	46	46	17	14
3.	SaluranIrigasi primer(m)	323.787	329.787	80.946	80.946	11.232	9.394
4.	Saluran Irigasi sekunder (m)	204.000	231.117	78.320	53.203	35.160	33.160

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Bidang Sumber Irigasi dan Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana lampiran I.



d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral berjumlah 330 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pekerjaan umum menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar Rp154.613.564.615,00 realisasi Rp145.304.532.695,00 atau 98,48%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp822.062.900,00 realisasi Rp753.514.929,00 atau 91,66%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp3.654.491.000,00 realisasi Rp3.555.892.438,00 atau 97,30%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp126.546.000,00 realisasi Rp120.627.100,00 atau 95,32%.
- 4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp454.592.000,00 realisasi Rp441.045.341,00 atau 97,02%.
- 5) Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp17.260.090.000,00 realisasi Rp16.617.837.425,00 atau 96,28%
- 6) Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong, anggaran sebesar Rp7.664.067.000,00 realisasi Rp5.889.097.395,00 atau 76,84%
- 7) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, anggaran sebesar Rp23.881.971.300,00 realisasi Rp22.949.576.255,00 atau 96,10%
- 8) Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Rp112.524.500,00 realisasi Rp95.472.350,00 atau 84,85%



- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran sebesar Rp1.403.432.925,00 realisasi Rp983.982.950,00 atau 70,11%
- 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesar Rp20.466.274.050,00 realisasi Rp19.797.202.051,00 atau 96,73%.
- 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar Rp1.115.492.000,00 realisasi Rp1.075.565.480,00 atau 96,42%.
- 12) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, anggaran sebesar Rp2.745.032.000,00 realisasi Rp2.532.682.205,00 atau 92,26%.
- 13) Program Pembangunan Turap /Talud /Bronjong anggaran Rp1.407.315.000,00 realisasi Rp1.160.305.470,00 atau 82,45%.
- 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, anggaran Rp5.943.887.000,00 realisasi Rp5.140.873.550,00 atau 86,49%.
- 15) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, anggaran sebesar Rp57.279.651.190,00 realisasi Rp54.790.545.655,00 atau 95,65%
- 16) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaran sebesar Rp10.276.135.750,00 realisasi Rp9.400.312.106,00 atau 91,48%

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana ke-PU an, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan.



g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bidang Sumber Daya Air, Bidang Irigasi dan Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral adalah sebagaimana pada lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Terbitnya Keputusan Bupati No. 105/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Status Jalan Kabupaten mengakibatkan terdapat ruas jalan yang semula Jalan Kabupaten menjadi tidak berstatus. Solusinya menempatkan ruas jalan tidak berstatus masuk ke salah satu kategori kelas jalan.
2. Penanganan Penyediaan air bersih masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Solusinya menambah fasilitas penyediaan air bersih dari berbagai stake holder.
3. Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Solusinya dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemanfaatan IPAL Komunal
4. Belum adanya peraturan perundangan di tingkat kabupaten berkenaan dengan irigasi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan. Solusinya perlu dibuat Perda mengenai Irigasi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat, terutama dalam menjaga hasil-pembangunan. Solusinya perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah desa dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

4. Urusan Penataan Ruang

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
 - a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdesaan
 - b) Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Tata Ruang Daerah
 - c) Penyusunan Rencana Tata Ruang Perkotaan
 - d) Penyusunan Rencana Tata Ruang Perdesaan
- 2) Program Pemanfaatan Ruang
 - a) Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
 - b) Sosialisasi Kebijakan, Norma, dan Manual Pemanfaatan Ruang
 - c) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - b) Pengawasan Pemanfaatan Ruang
 - c) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - d) Pelayanan Perijinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - e) Pelayanan Ijin Reklame
 - f) Pelayanan Izin Pembangunan Menara Seluler
 - g) Pelayanan Izin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
 - a) RDTR Kawasan Perdesaan Kecamatan Tempel seluas 3.249 ha, 20 buku.
 - b) Fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman 12 bulan, Dokumen kajian dampak pemindahan bandara 20 buku, dan Penyusunan LayOut Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman 20 buku.



- c) Review RDTR Kecamatan Gamping 2.925 ha 20 buku, dan Review RDTR Kecamatan Mlati 2.852 ha 20 buku.
 - d) Review RDTR Kecamatan Pakem 4.384 ha 20 buku, dan Review RDTR Kecamatan Ngemplak 3.571 ha 20 buku.
- 2) Program Pemanfaatan Ruang
- a) Tersusunnya Perbub sertifikat laik fungsi 11 dokumen, dan Tersusunnya database kepemilikan bangunan dan sensus bangunan 3 kecamatan.
 - b) Sosialisasi peraturan baru tentang bangunan dan lingkungan 17 kecamatan.
 - c) Tersusunnya Kajian akademis Izin Pemanfaatan Ruang 1 kajian.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a) Pengaturan pemasangan reklame 8 lokasi, Pembangunan panggung baliho 7 buah, dan Kajian peraturan pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah 1 kajian.
 - b) Pengawasan bangunan, tata bangunan dan lingkungan 12 bulan.
 - c) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 jenis sosialisasi.
 - d) Penerbitan IMB 4.039 izin.
 - e) Penerbitan Ijin Reklame 183 izin
 - f) Penerbitan Izin Pembangunan Menara Seluler 25 izin.
 - g) Penelitian permohonan pengesahan site plan 185 buah, penelitian surat keterangan tata bangunan dan lingkungan 3.590 buah, penelitian pecah sertifikat 113 buah, dan penelitian rekomendasi lahan terkena sempadan 75 buah.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan ruang sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Capaian 2012	Capaian Sleman 2013
1.	Informasi Penataan Ruang - Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014	79,41%	80,23% ¹⁾
2.	Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR - Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program	100%	2014	100%	100% ¹⁾
3.	Izin Penataan Ruang - Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya.	100%	2014	85,9%	100% ¹⁾
4.	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang - Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014	100%	100% ^{1) 2) 3)}
5.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	30,02%	30,30% ²⁾

Sumber: Bappeda¹⁾, PUP²⁾, DPPD³⁾

Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sampai dengan tahun 2013 mencakup kurang lebih 87,65% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Adapun Studi RDTR yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 3.16. Studi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun

No.	Lokasi	Luas Perencanaan (Ha)	
		Studi RDTR	Belum ada
1	2	3	4
1.	Moyudan	2.762	
2.	Minggir	2.727	



1	2	3	4
3.	Seyegan	2.663	
4.	Godean	2.684	
5.	Gamping	2.925	
6.	Mlati	2.852	
7.	Depok	3.555	
8.	Berbah		2.299
9.	Prambanan	4.135	
10.	Kalasan	3.584	
11.	Ngemplak	3.571	
12.	Ngaglik	3.852	
13.	Sleman	3.132	
14.	Tempel	3.249	
15.	Turi	4.309	
16.	Pakem	4.384	
17.	Cangkringan		4.799
Jumlah		50.384	7.098

Sumber : Bappeda Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda, didukung oleh Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Bidang Perizinan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana pada lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda, Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Bidang Perizinan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah berjumlah 51 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terinci pada lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp2.098.819.000,00, realisasi Rp1.876.395.435,00 atau 89,40%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar Rp762.344.000,00 realisasi sebesar Rp694.358.850,00 atau 91,08%.
- 2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp218.840.000,00 realisasi sebesar Rp166.978.770,00 atau 76,30%.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp1.117.635.000,00 realisasi sebesar Rp1.015.057.815 atau 90,82%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan penataan ruang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan untuk melakukan penyusunan awal rencana. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa, dan musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya musrenbang kabupaten dan perumusan rancangan akhir. Setelah mendapat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan dilakukan penetapan rencana.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda, Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Bidang Perizinan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah adalah sebagaimana terlampir pada lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

Belum semua wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada saat yang sama, Studi RDTR yang telah disusun untuk 15 kecamatan belum diperdakan. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang beserta raperda RDTR dan penyusunan KLHS RDTR.



5. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat-menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD.
 - n) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan lokakarya
 - b) Penyusunan dokumen kepegawaian.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD.
 - e) Penyusunan indikator kinerja



-
- 5) Program Kerjasama Pembangunan daerah
 - a) Penunjangkan sekber kartamantul
 - b) Koordinasi kerjasama pembangunan daerah.
 - c) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa
 - 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.
 - 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - a) Koordinasi pengembangan wilayah strategis.
 - b) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan.
 - 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a) Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
 - b) Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
 - c) Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - d) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - e) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - f) Monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program.
 - g) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
 - h) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - i) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi.



- j) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten, Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan evaluasi LAKIP.
 - k) Analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan.
 - l) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pengendalian pembangunan kecamatan.
 - m) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan.
 - n) Penyusunan efektivitas anggaran SKPD.
 - o) Penyusunan pagu indikatif SKPD
 - p) Analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi:
- a) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah.
 - b) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan.
- 11) Program Perencanaan Sosial Budaya melalui kegiatan koordinasi penyusunan masterplan pendidikan.
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana melalui kegiatan koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pelayanan surat-menyurat selama 12 bulan, meliputi surat masuk 9.712 lembar, surat keluar 6.725 lembar.
 - b) Pembayaran langganan listrik dan telepon 12 bulan.
 - c) Pembayaran bendahara 9 orang dan pengurus barang 2 orang.
 - d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran jasa petugas kebersihan kantor 1 orang.
 - e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik (dan komputer 71 unit) 7 unit dan komputer 41 unit, dan laptop 24 unit.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan.



- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.
 - h) Penyediaan peralatan listrik/penerangan kantor 7 macam, pemeliharaan jaringan listrik 12 bulan.
 - i) Pembelian peralatan rumah tangga 2 jenis
 - j) Fasilitas kebutuhan rapat dan tamu 12 bulan
 - k) Fasilitas kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
 - m) Pelayanan arsip dan perpustakaan 12 bulan
 - n) Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
- a) Pemeliharaan dan perbaikan gedung 1 unit, penataan interior lobby kantor 1 unit.
 - b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 12 unit kendaraan dan kendaraan roda empat 7 unit kendaraan 12 bulan.
 - c) Pemeliharaan meja kursi 20 unit.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Pengiriman personel bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan lokakarya 1 orang.
 - b) Pengelolaan kepegawaian 70 pegawai, buku penjaminan kenaikan gaji berkala 12 bulan, buku penjaminan kenaikan pangkat dan DP3 70 pegawai.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan bulanan 48 buku, laporan tahunan 10 buku, LAKIP 10 buku dan laporan capaian target kinerja 5 eks.
 - b) Laporan keuangan per bulan, semesteran dan tahunan 14 laporan.
 - c) Laporan program kerja SKPD 10 buku, Renja SKPD 10 buku, rencana target kinerja 5 buku, RKT SKPD 10 buku, Tapkin 10 buku, RKA dan DPA 20 buku, RKA dan DPA perubahan anggaran 20 buku, perubahan Renstra SKPD 10 buku.
 - d) Profil SKPD 10 buku.



- 5) Program Kerjasama Pembangunan
 - a) Laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 1 buku.
 - b) Koordinasi dan fasilitasi kerjasama daerah 12 bulan dan 12 dokumen, kerjasama dengan pihak ketiga 12 bulan 23 dokumen kerjasama, instrumen evaluasi kerjasama 1 dokumen.
 - c) Naskah perjanjian kerjasama antar daerah dan lembaga 43 buah, perjanjian tanah kas desa 10 buah.
- 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan terealisasi koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah 3 kali, 2 kasus.
- 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - a) Koordinasi pengembangan wilayah strategis di 10 kecamatan 31 kali.
 - b) Dokumen studi analisa kebutuhan dan penyusunan rencana program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 30 buku.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi peningkatan kapasitas perencanaan 2 kali, pengendalian pelaksanaan 50 SOP, pelatihan kantor sendiri 2 kali.
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Draft Raperda perubahan RPJMD 2011 - 2015 150 buku.
 - b) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 150 buku, pendampingan penyusunan Renstra SKPD 2014 48 SKPD, dokumen Rencana Kerja Tahunan Kabupaten 2014 20 buku, forum konsultasi publik 1 kali.
 - c) Dokumen hasil musrenbang kecamatan 100 eks, Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD dan dokumen hasil musrenbang RKPD 100 buku, dokumen hasil forum SKPD 100 buku dan dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150 buku.



- d) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah 1 dokumen 10 set, publikasi naskah LPPD 1 dokumen, 1 kali, 2 media massa.
- e) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 kepada DPRD 1 dokumen 70 set.
- f) Laporan evaluasi sesuai form Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD 65 buku.
- g) Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2014, 200 buku, dokumen hibah bansos tahun 2014 5 eks.
- h) Dokumen usulan perencanaan DAK 2014 15 buku, laporan triwulan monitoring DAK 2013 40 buku dan laporan akhir 15 buku.
- i) Laporan pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan, urusan bersama 32 buku dan laporan kegiatan dana dekonsentrasi 10 buku.
- j) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemkab 10 buku, Penetapan Kinerja TA 2013 10 buku, evaluasi LAKIP instansi 48 LHE, evaluasi Tapkin SKPD 4 dokumen, sosialisasi LAKIP SKPD 30 orang.
- k) Data informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan per semester 2 dokumen 8 eks, laporan realisasi fisik dan keuangan per bulan 10 dokumen 20 eks.
- l) Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan di 17 kecamatan 113 buku, dokumen hasil pengendalian pembangunan kecamatan di 17 kecamatan 75 buku.
- m) Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 200 buku, dokumen penerima hibah bansos tahun 2014 200 eks, dokumen pagu indikatif kewilayahan tahun 2015 150 eks.
- n) Dokumen kajian anggaran SKPD bidang sarana prasarana 25 buku, dokumen kajian standar penghitungan belanja kegiatan 10 buku.



- o) Pelaksanaan monitoring paska pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gunung merapi 3 bulan 10 laporan.
 - p) Laporan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 1 dokumen 10 eks, laporan kajian kebijakan pembangunan 1 dokumen 10 eks.
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- a) Dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah 30 buku.
 - b) Dokumen indikator daerah rawan pangan tahun 2013 30 buku.
- 11) Program Perencanaan Sosial Budaya terealisasi dokumen kajian pendidikan anak usia dini 25 buku.
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana terealisasi fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi 12 bulan, dokumen laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi 20 buku.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, merupakan pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mengacu pada dua peraturan perundangan. tersebut. Proses perencanaan diawali dengan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan awal RKPD digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) Selanjutnya pelaksanaan musrenbang. Musrenbang merupakan bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan

partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Musrenbang dilakukan secara terpadu yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2013 untuk pelaksanaan tahun 2014 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Mekanisme dan proses yang dilaksanakan telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Musrenbang desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan minggu IV bulan Januari 2013;
- 2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu I dan minggu II bulan Februari 2013;
- 3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2013,
- 4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu II bulan Maret 2013;
- 5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada minggu III bulan Maret 2013;
- 6) Perumusann rancangan akhir serta pengesahan RKPD oleh Bupati dilaksanakan pada minggu IV bulan Mei 2013;
- 7) Musrenbang Provinsi, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2013;



- 8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, dilaksanakan pada minggu II Mei - I Juni 2013, Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu II Juni 2013, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 30 September 2013;
- 9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2013, dilaksanakan pada bulan Mei 2013, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan ke DPRD pada minggu I Juni 2013, Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2013 ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2013;
- 10) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan pada minggu I - II bulan November 2012, penyerahan Nota Keuangan RAPBD pada tanggal 10 November 2012, Perda APBD ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 4-12 Januari 2013.
- 11) Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, dilaksanakan pada minggu III - IV bulan Juli 2012, penyerahan Nota Keuangan RAPBD Perubahan pada tanggal 27 Juli 2012, Perda APBD Perubahan ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2012, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 3 - 7 September 2012.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan.



Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan pembangunan di Bappeda berjumlah 70 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp5.511.045.350,00 realisasi Rp4.964.395.893,00 atau 90,08%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp691.952.350,00 realisasi Rp575.270.997,00 atau 83,14%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp601.494.000,00 realisasi Rp575.696.756,00 atau 95,71%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp58.345.000,00 realisasi Rp42.956.000,00 atau 73,62%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp205.480.750,00 realisasi Rp195.048.000,00 atau 94,92%
- 5) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar Rp318.059.000,00 realisasi Rp311.938.700,00 atau 98,08%
- 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesar Rp27.177.000,00 realisasi Rp25.458.000,00 atau 93,67%
- 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, anggaran sebesar Rp213.740.000,00 realisasi Rp210.717.900,00 atau 98,59%
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp100.112.500,00 realisasi sebesar Rp97.616.250,00 atau 97,51%



- 9) Program Perencanaan Pembangunan, anggaran sebesar Rp2.874.919.750,00 realisasi Rp2.537.700.790,00 atau 88,27%
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp227.805.000,00 realisasi Rp213.591.250,00 atau 93,76%
- 11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp78.380.000,00 realisasi Rp74.164.000,00 atau 94,62%
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, anggaran sebesar Rp113.580.000,00 realisasi Rp104.237.250,00 atau 91,77%

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal, kemudian pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, dan LSM. Selanjutnya dari hasil musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa perumusan Renja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD dan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Proses perencanaan dengan menggunakan basis data sekunder seringkali dianggap masih belum cukup memadai. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar proses perencanaan pembangunan belum terjamin keandalannya, masih terdapat kelemahan pada kekuatan data dan informasi untuk memproyeksikan arah pembangunan berikutnya. Solusi yang dilakukan dengan cara



meningkatkan kualitas data dan informasi serta penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.

- 2) Regulasi tentang perencanaan pembangunan tidak sinkron antar kementerian, sehingga berimplikasi pada mekanisme/proses perencanaan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah dalam proses perencanaan tetap memenuhi regulasi yang ada dengan menyesuaikan kondisi daerah.
- 3) Belum ada kejelasan dalam proporsi pembiayaan pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan. Solusi yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan tentang proporsi pembiayaan.

6. Urusan Perumahan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Perumahan
 - a) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan.
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana rusunawa/rusunami.
 - c) Pengelolaan Rusunawa/ rusunami.
 - d) Pendampingan Rekompak Java *Reconstruction Fund* (JRF).
 - e) Penataan Kawasan *Land Consolidation* (LC).
 - f) Sosialisasi dan pendampingan bantuan stimulan perumahan swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
- 3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.
 - b) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.
 - c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.

- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegah bahaya kebakaran.
 - e) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
 - f) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- a) Koordinasi pengelolaan areal pemakaman.
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- a) Kajian perumahan di Kabupaten Sleman 1 paket kajian, dan Pemutakhiran database RP4D Kabupaten Sleman 10 buku.
 - b) Tersedianya PSD (prasarana dan sarana dasar) lingkungan rusunawa 9 lokasi meliputi landscaping dan talud sungai di Rusunawa Dabag Condongcatur Depok, *landscaping* di Rusunawa Mranggen Sinduadi Mlati, IPAL komunal di Rusunawa Gemawang Sinduadi Mlati, dan sambung listrik PLN, talud, pagar, drainase di Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati.
 - c) Terkelolanya 11 twin blok rusunawa dengan baik di 4 lokasi, Sosialisasi peraturan hunian rusunawa kepada 1000 orang, dan Terpasangnya 657 petunjuk ruangan dan 28 nomor lantai.
 - d) Fasilitas pelaksanaan rekompak 18 desa 5 kecamatan, dan Fasilitas pendampingan JRF 10 kali.
 - e) Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC Sinduadi) 2.352 m², dan Kompensasi bangunan dan taman milik warga yang tidak sesuai dengan perencanaan LC 60 unit.
 - f) Terfasilitasinya bantuan stimulan perumahan swadaya 1 paket.
- 2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial melalui Terlaksananya pendampingan perumahan pasca bencana BDR-BDL (Bantuan Dana Rumah – Bantuan Dana Lingkungan) 600 unit.

3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- a) Monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran 35 obyek, dan indentifikasi sebab-sebab kebakaran 50 obyek.
- b) Kesamaptaan pemadam kebakaran 6 kali, dan tersedianya pakaian kerja 35 stel.
- c) Penyuluhan dan pelatihan PBK 1 kali diikuti oleh 40 orang.
- d) Pemeliharaan mobil damkar 4 buah, mobil tanki air 2 buah, tabung APAR 31 buah, pompa diesel 2 buah, pesawat HT dan Riq 15 buah, tandon air 1 buah, hydrant 3 buah, SCBA (*self contains breathing apparatus*) 3 buah. Pemeliharaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran 17 unit/ instalasi.
- e) Kesiapsiagaan PBK 148 kali, dan Terbangunnya tempat parkir mobil dinas PBK 1 unit.
- f) Posko Siaga PBK 12 bulan, dan Operasional pemadaman kebakaran 64 kali.

4) Program Pengelolaan Areal Permukiman

- a) Terlaksananya pelayanan pemakaman TPU 1 lokasi.
- b) Terbangunnya PSD TPU Madurejo 1 lokasi, terbangunnya lampu taman TPU Seyegan 10 unit, tersedianya marmer TPU Seyegan 150 unit, terbangunnya grobog TPU Seyegan 60 unit, tersedianya pusara TPU Seyegan 60 unit.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.17. Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Capaian 2012	Capaian 2013
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau				
	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	91,28%	91,74%
	- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	2,38%	4,44%
2.	Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum				
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU	100%	2025	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pada tahun 2013 dilakukan kajian perumahan di Kabupaten Sleman, keluaran berupa data perumahan kumuh serta pemutakhiran database RP4D, dengan ketersediaan data diharapkan kebijakan dibidang perumahan khususnya kawasan kumuh dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat.

Pembangunan gedung rusunawa baru tidak dilaksanakan pada tahun 2013, program dilaksanakan lebih pada penyempurnaan rusunawa yang sudah ada berupa optimalisasi pengelolaan rusunawa melalui sosialisasi peraturan, dan penyediaan PSD lingkungan di 9 lokasi rusunawa.

Fasilitasi pendampingan Rekompak JRF terus dilanjutkan di 18 desa, sedangkan penataan kawasan permukiman LC di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati seluas 22,5 ha, pada tahun 2013 dilaksanakan pembangunan prasarana lingkungan 2.352 m² dan kompensasi bangunan dan tanaman yang tidak sesuai dengan perencanaan LC 60 unit. Diharapkan penataan kawasan LC bisa tercapai sehingga kualitas kawasan dan lingkungan berimbang.

Sosialisasi dan pendampingan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk MBR dipergunakan untuk mendampingi program dari Kementerian Perumahan Rakyat. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial dilakukan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam



dalam bentuk pendampingan perumahan pasca bencana BDR-BDL 600 unit.

Untuk memenuhi kebutuhan makam bagi masyarakat Sleman, disempunakan TPU Madurejo dengan pembangunan PSD, dan TPU Seyegan dengan pembangunan lampu taman 10 unit, ketersediaan marmer 150 unit, pembangunan grobog 60 unit, dan penyediaan pusara 60 unit.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Bidang Perumahan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perumahan sebagaimana pada lampiran I. Sedangkan SKPD terkait yang mendukung urusan perumahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Prambanan serta Kecamatan Cangkringan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan di Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perumahan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana pada lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp20.732.600.500,00 realisasi Rp16.547.989.926,00 atau 79,82%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:



- 1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar Rp16.939.626.000,00 realisasi Rp13.521.839.601,00 atau 79,82%.
- 2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, anggaran sebesar Rp271.435.000,00 realisasi Rp203.603.600,00 atau 75,01%.
- 3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp652.111.500,00 realisasi Rp621.100.700,00 atau 95,24%.
- 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar Rp2.869.428.000,00 realisasi Rp2.201.445.625,00 atau 76,72%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga kurang dapat menggambarkan capaian-capaian kinerja perumahan secara signifikan. Solusi yang dilakukan adalah setiap tahun dilakukan pendataan baik melalui kajian maupun updating data RP4D tahap demi tahap perwilayah kecamatan, sehingga diharapkan data tentang perumahan kualitas dan kuantitasnya semakin baik.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - a) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



- a) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- b) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- c) Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
- d) Pembinaan Budi Pekerti Pemuda
- 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - a) Pemberian Penyuluhan tentang Narkoba Bagi Pemuda
 - b) Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Siswa
 - c) Rintisan Desa Pelopor Bebas Napza
 - d) Koordinasi dan Evaluasi Badan Narkotika Kabupaten(BNK)
- 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - a) Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga
 - b) Pengiriman dan Evaluasi Peserta Porseni Pondok Pesantren Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a) Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
 - b) Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Pelajar(POPDA)
 - c) Monitoring dan Evaluasi Olahraga Karyawan, Masyarakat i Lomba Juang
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahrag

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - a) Pelaksanaan lomba MTQ pelajar sekolah umum (SD,SMP,SMA/SMK) : 8 cabang MTQ SD, 9 cabang MTQ SMP dan 10 cabang MTQ SMA/SMK
- 2) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - a) Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda sebanyak 20 OKP, terpilihnya pemuda pelopor 4 orang dari bidang



- pendidikan, budaya dan pariwisata, kewirausahaan, teknologi tepat guna dan terlaksananya pembinaan 3 orang kwarcab
- b) Diklat kepemimpinan dasar bagi 60 orang pemuda
 - c) Pelaksanaan kemah bakti pemuda 200 orang, pelaksanaan sosialisasi pemilihan 50 orang dan pengiriman 4 pemuda mewakili propinsi)
 - d) Sarasehan PBKB (Pendidikan Budaya dan Karakter bagi Pemuda) untuk 150 orang
- 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- a) Penyuluhan dan pembentukan kelompok pemuda anti narkoba sebanyak 105 orang di 7 desa.
 - b) Penyuluhan dan pembentukan kelompok siswa anti narkoba dan kedisiplinan siswa sebanyak 100 orang, 3 kali sweeping
 - c) Penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan Napza di 3 desa 120 orang, fasilitasi kegiatan penyuluhan 16 satgas dan pembentukan 2 satgas baru narkoba
 - d) Koordinasi dan evaluasi pembinaan dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2 kali, fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten 4 kali, pemberian hadiah Lomba Satgas Desa dan Lomba Sekolah Bebas Narkoba (LSBN) 2 event dan fasilitasi TOT Satgas Desa sebanyak 2 kali.
- 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- a) Pembinaan klub olahraga usia dini 9 klub, cabang sepak bola di 6 kecamatan 6 KOP, cabang bola voli di 6 kecamatan 6 KOP, cabang tenis meja di 5 kecamatan 5 KOP, cabang sepak takraw di 6 kecamatan 6 KOP dan lomba 3 cabang olahraga tradisional
 - b) Fasilitasi seleksi dan pengiriman peserta Porseni Pondok Pesantren sebanyak 3 kali
- 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- a) Penyelenggaraan klas olahraga di 3 SMP dan 2 SMA



- b) Kompetisi olahraga pelajar 18 cabor dan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 20 sekolah
 - c) Monitoring dan evaluasi kegiatan olahraga masyarakat, karyawan dan Tri Lomba Juang sebanyak 14 kali, fasilitasi kegiatan peringatan Hari Jalan Kaki Sedunia sebanyak 1 kali, fasilitasi kegiatan Tri Lomba Juang tingkat provinsi untuk 8 regu dan fasilitasi Haornas 1 kali.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- a) Pengelolaan dan pemeliharaan gedung Gelanggang Pemuda dan Olahraga Klebengan

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku terlampir)

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga rata-rata persentase pencapaian target indikator masukan dana sebesar 85,24% dan rata-rata keluaran kegiatan sebesar 100% yang meliputi 6 program dan 15 kegiatan.

Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2013 didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan kinerja aparatur pemerintah. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

Adapun Prestasi yang dicapai dalam urusan kepemudaan dan olahraga antara lain :

- 1) Juara I Forum Kreativitas Dan Inovasi PTK IPA tingkat nasional atas nama Heru Wahyudi, S.Pd, M.Eng, M.Pd.Si.guru Fisika SMA Islam 3 Sleman
- 2) Juara I lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional atas nama Wahyu Pratama Adi Negara siswa SMAN 1 Sleman
- 3) Juara I bidang lomba LKS Autobody Repair tingkat nasional atas nama Hendriana Helda Pratama siswa SMK N 2 Depok



- 4) Juara I bidang lomba Autobody Repair tingkat nasional atas nama Didin Pradinawan siswa SMK N 2 Depok
- 5) Juara I bidang lomba LKS Mobile Robotics tingkat nasional atas nama Luthfi Nur Indrawan siswa SMK N 2 Depok
- 6) Juara I bidang lomba LKS Mecatronics tingkat nasional atas nama Fahrudin Hasan siswa SMK N 2 Depok
- 7) Juara I bidang lomba LKS Mecatronics tingkat nasional atas nama Angga Priyatmoko siswa SMK N 2 Depok
- 8) Juara I bidang lomba LKS Leather Craft tingkat nasional atas nama SMK N 1 Kalasan
- 9) Juara I bidang lomba OSN SD tingkat nasional atas nama Daffa Raihan Dewanto siswa SD Al Azhar 31.
- 10) Juara II guru berprestasi tingkat nasional atas nama Aridyah Niken Harjanti, M.Pd. guru Bahasa Inggris SMPN 1 Kalasan
- 11) Juara II bidang lomba LKS Outo Card tingkat nasional atas nama Angga Ramadhan siswa SMK N 2 Depok
- 12) Juara II bidang lomba LKS Secretary tingkat nasional atas nama Theodora Anggraini S siswa SMK N 1 Godean
- 13) Juara II bidang lomba LKS Accountig tingkat nasional atas nama Desi Nur Azizah siswa SMK N 1 Depok
- 14) Juara II bidang lomba OSN SMP tingkat nasional atas nama Cecilia Jatu Prabu Datu siswa SMP N 4 Pakem
- 15) Juara II bidang lomba student company tingkat nasional atas nama Isnaini siswa SMK N 1 Godean
- 16) Juara III guru berprestasi tingkat nasional atas nama Martoyo, S.Pd. guru SDN Tanjungtirta 1 Berbah
- 17) Juara III lomba kreativitas guru tingkat nasional atas nama Dra. Hewi Murdaningsih, M.Pd.Si guru IPA SMPN 2 Ngemplak
- 18) Juara III lomba lembaga LKP berprestasi tingkat nasional atas nama Ani Syafaatun, S.Pd. LPK Budi Mulia Dua Culinary School.
- 19) Juara III lomba membuat gambar bercerita (FLSSN) tingkat nasional atas nama Nur Laila Puspita Sari siswa SD Mejing 2



- 20) Juara III lomba bulutangkis ganda putri tingkat nasional atas nama Nuzul Fitri Purwanto siswa SMAN 1 Seyegan
- 21) Juara III lomba bulutangkis ganda putri tingkat nasional atas nama Dian Nofiana Dwi Subekti siswa SMAN 2 Ngaglik
- 22) Juara III lomba karya tulis tingkat nasional atas nama Antang WW Ardhana, S.Kom. instruktur kursus komputer LKP Bugs Training Center (Depok Sleman)
- 23) Juara III lomba karya tulis tingkat nasional atas nama Ismuningsih pengelola PAUD (TPA, KB, SPS) KB Fairus Aqila (Kalasan Sleman)
- 24) Juara III bidang lomba LKS IT and Network Support tingkat nasional atas nama Restu Pratama siswa SMK N 2 Depok
- 25) Juara IV lomba karya tulis tingkat nasional atas nama Dra. Flori Setiarini, MM instruktur kursus tata busana LKP Kumalasari (Depok Sleman)
- 26) Anggota tim Paskibraka Nasional atas nama Yollandaru Yoga Santika siswa SMKN 2 Depok
- 27) Juara umum II MTQ sekolah umum tingkat Provinsi atas nama kontingen Kabupaten Sleman
- 28) Rangking II hasil Ujian Nasional nilai rata-rata SMP tingkat Provinsi DIY
- 29) Juara umum III POPDA tingkat Provinsi DIY

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggara urusan ini didukung oleh Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.



Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berjumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp2.024.207.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.725.404.925,00 atau sebesar 85,24%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran sebesar Rp177.545.000,00 realisasi Rp176.795.000,00 atau 99,58%
- 2) Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar Rp398.857.000,00 realisasi Rp371.938.950,00 atau 93,25%
- 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran sebesar Rp470.650.900,00 realisasi Rp447.415.900,00 atau 95,06%
- 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, anggaran sebesar Rp185.790.000,00 realisasi Rp182.735.000,00 atau 98,36%
- 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, anggaran sebesar Rp497.365.000,00 realisasi Rp476.546.500,00 atau 95,81%
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, anggaranRp294.000.000,00 realisasi Rp69.973.575,00 atau 23,80%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa serta musrenbang kecamatan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2013 antara lain:

- 1) Belum tercapainya target Juara II di POPDA DI Yogyakarta. Saat ini kontingen POPDA Sleman mencapai juara Umum III. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyediakan kelas olahraga pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya penyediaan kelas olahraga di SMP N 2 Tempel.
- 2) Belum mandirinya organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Sleman secara finansial. Solusinya antara lain dengan hibah penguatan organisasi kepemudaan melalui pemerintah daerah dan juga memanfaatkan CSR (*Company Social Responsibility*) perusahaan.
- 3) Penguatan organisasi kepemudaan belum maksimal. Solusi nya pemerintah daerah mengadakan bimbingan penguatan dan manajemen kepemudaan.



- 4) Penguatan organisasi kepemudaan secara yuridis formal sehingga dapat menggali potensi pemuda secara intensif. Misalnya pelebagaan organisasi kepemudaan dengan peraturan perundangan sehingga pemerintah daerah/provinsi/pusat dapat memberikan dukungan anggaran.

9. Urusan Penanaman Modal

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - l) Pengelolaan Dokumen SKPD
 - m) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala taman
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan lokakarya
 - b) Pengkajian kompetensi kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan



- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
- c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- d) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
 - b) Peningkatan kegiatan pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - c) Penyusunan investor guide penanaman modal
 - d) Penyelenggaraan pameran investasi
 - e) Pembuatan materi promosi investasi
- 6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya Dan Prasarana Daerah
 - a) Kajian sumber daya yang terkait dengan investasi
 - b) Evaluasi dana penguatan modal
 - c) Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi dana penguatan modal
 - d) Analisis kelayakan modal dan pengendalian kredit dana penguatan modal
 - e) Rekonsiliasi dana penguatan modal
 - f) Regulasi penyertaan modal

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pelayanan surat menyurat selama 12 bulan, meliputi surat masuk dan keluar 2.142 lembar.
 - b) Pembayaran listrik , telepon dan air selama 12 bulan
 - c) Pembayaran bendahara 4 orang, pengurus barang 1 orang.
 - d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan.
 - e) Pemeliharaan komputer 9 unit, mesin ketik 3 unit, dan printer 8 unit.



-
- f) Penyediaan alat tulis kantor 29 macam selama 12 bulan.
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan 8 macam selama 12 bulan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik 9 macam
 - i) Penyediaan makan minum rapat dan tamu untuk 392 orang selama 12 bulan
 - j) Penyediaan biaya perjalanan dinas 24 kali selama 12 bulan
 - k) Pengamanan kantor 12 bulan.
 - l) Pelayanan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan, arsip yang dikelola 850 eks, arsip in aktif yang dikelola 750.
 - m) Pembayaran langganan surat kabar/majalah selama 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan gedung 1 unit.
- a) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 2 unit, dan kendaraan roda dua 5 unit.
 - b) Pemeliharaan mebelair 9 unit.
 - c) Pemeliharaan taman 1 paket
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Pembinaan pegawai 23 orang, bimbingan teknis pegawai 23 orang.
 - b) Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi 23 orang pegawai.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan tahunan, laporan bulanan dan LAKIP 14 laporan.
 - b) Laporan keuangan 14 laporan
 - c) Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD 20 buku, dokumen perubahan Renstra SKPD 10 buku, dokumen RBA tahun 2014 10 buku.
 - d) Profil data KP3M 10 buku
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- a) Koordinasi penanaman modal di tingkat Kabupaten 5 kali, di tingkat provinsi 12 kali, dan di tingkat pusat 5 kali,

- menyelenggarakan *investor gathering* di Batam Propinsi Kepulauan Riau 1 kali, mengirimkan misi ke Jakarta 1 kali, ke Bali 1 kali serta melaksanakan Forkom investasi 1 kali.
- b) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi PMA 45 unit dan PMDN 36 unit
 - c) Buku profil dan peta sebaran perusahaan PMA dan PMDN 250 eks.
 - d) Gelar potensi investasi di Jakarta 1 kali, serta promosi melalui web 1 kali.
 - e) Materi promosi investasi 500 buku, 500 eks liflet, dan 500 VCD.
- 6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah
- a) Dokumen kajian kebijakan akuntansi BLUD 1 set, dokumen analisis laporan keuangan BLUD 1 buku.
 - b) Laporan dana pengelolaan penguatan modal 2 buku, laporan estimasi kebutuhan DPM 1 laporan.
 - c) Laporan dana penguatan modal 36 buku, updating sistem komputerisasi dana penguatan modal 1 paket.
 - d) Berita acara penetapan penerima DPM 37 set, laporan analisis penyertaan modal 6 buku, laporan pengendalian penguatan modal 6 buku.
 - e) Laporan rekonsiliasi penguatan modal 1 buku, laporan rekonsiliasi penyertaan modal 1 buku.
 - f) Penerbitan SK penetapan dan perjanjian DPM 746 SK, sewa save deposit box 3 unit 12 bulan.
 - g) Draft Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana penguatan modal 10 eks.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.18. Pencapaian SPM bidang Penanaman Modal

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Target Sleman	Capaian
1.	Kebijakan Penanaman Modal - Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) per tahun	2014	1 (satu) per tahun	2 (dua) sektor
2.	Kerjasama Penanaman Modal - Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali
3.	Promosi Penanaman Modal - Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab/kota	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	5 (lima) kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal - Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	100%	2014	100%	83,33%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	100%
6.	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal - Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	100%	100%
7.	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal - Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2013 jumlah unit usaha PMA sebanyak 44 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US\$ 206.788.265,40 mengalami penurunan sebesar 11,46% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2012 sebesar US\$ 233.560.125,46. Penurunan ini disebabkan ada 2 (dua) perusahaan PMA yang berubah status menjadi PMDN. Meskipun mengalami penurunan nilai investasinya, tapi dalam penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 1,28%, yaitu 7.200 tenaga kerja pada tahun

2012 menjadi 7.292 tenaga kerja pada tahun 2013. Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2013 mencapai 40 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp1.868.199.326.172,00 meningkat 72,49% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2012 sebesar Rp1.083.065.390.147,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.782 orang.

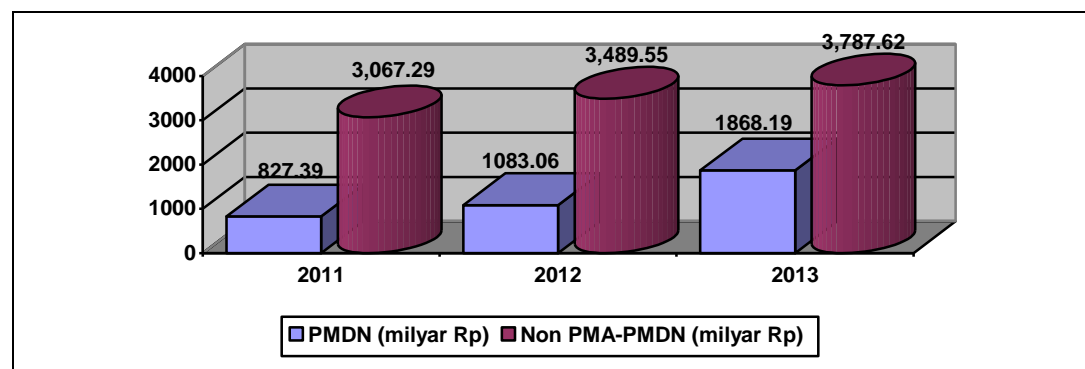
Perkembangan penanaman modal selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.19. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2013

No	Uraian	TAHUN		
		2011	2012	2013
1.	Jumlah Unit Usaha			
	a. PMA	41	42	44
	b. PMDN	32	32	40
	c. Non PMA-PMDN	31.566	32.452	33.341
2.	Nilai Investasi			
	a. PMA (Juta US\$)	185,19	233,56	206,78
	b. PMDN (Milyar Rp)	827,39	1.083,06	1.868,19
	c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp)	3.067,29	3.489,55	3.787,62
3.	Tenaga Kerja (org)			
	a. PMA	6.385	7.200	7.292
	b. PMDN	9.269	9.771	9.782
	c. Non PMA-PMDN	250.450	259.396	266.489

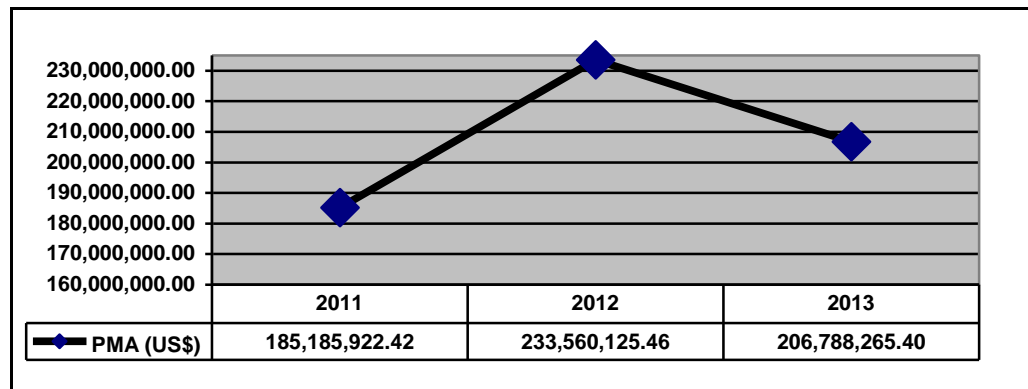
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.12. Capaian Investasi PMDN & Non PMA-PMDN Tahun 2011-2013



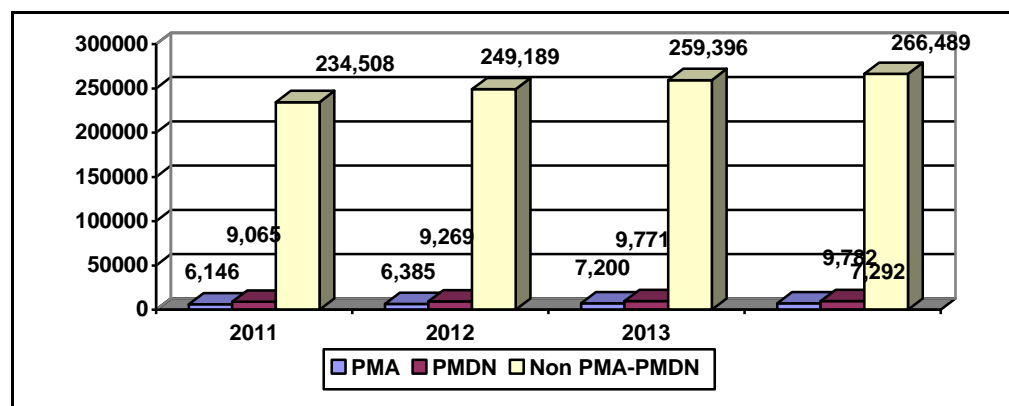
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman

Grafik 3.13. Capaian Investasi PMA Tahun 2011-2013



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.14. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2011-2013



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2013, kenaikan nilai investasi cukup tinggi. Kenaikan nilai investasi pada tahun 2013 dikarenakan para investor (perusahaan) sudah memahami pentingnya mengirimkan LKPM, serta mulai tertib mengirimkan LKPM sesuai dengan kenyataan di lapangan, baik mengenai nilai investasi, tenaga kerja, maupun kapasitas produksi. Selain itu adanya penambahan beberapa unit perusahaan PMA dan PMDN. Pada tahun 2013, berdiri 8 unit perusahaan PMDN, yaitu PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Royal Ambarukmo Hotel, PT. Trans Retail Indonesia, PT. Marel Sukses Pratama, PT. BPR Bank Sleman, PT. The Rich (Garuda Mitra Sejati), PT. Merapi Merbabu Hotel, dan PT. Kusuma Sandang.



Pada tahun 2013, ada penambahan 4 unit PMA yaitu PT. Nexus Fashion & Sport, PT. Mano, PT. SN Prengar Jaya, dan PT. Song One Melati. Namun ada pengurangan 2 unit perusahaan karena seluruh sahamnya telah dimiliki oleh orang Indonesia sehingga menjadi PMDN, yaitu PT. Royal Ambarukmo Hotel dan PT. Trans Retail Indonesia. Adanya pengurangan 2 unit perusahaan PMA menyebabkan nilai investasinya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 2 unit perusahaan tersebut sahamnya lebih besar di banding dengan penambahan 4 unit perusahaan PMA yang masuk.

Dana penguatan modal pada tahun 2013 sebesar Rp22.403.000,00 diberikan kepada 745 kelompok sasaran. Besarnya Dana Penguatan Modal tahun 2013 ini naik 6,07% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp21.043.500,00 yang diberikan kepada 645 kelompok sasaran. Sementara dana penyertaan modal sebesar Rp63.580.000.000,00 naik 72,01% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp17.798.692.573,00. Bagian laba dari dana penyertaan modal tahun 2013 meningkat 17,83% dari tahun 2012, yaitu dari Rp12.729.320.329,30 pada tahun 2012 menjadi Rp15.491.230.879,36 pada tahun 2013.

Gambaran umum jumlah dana penguatan modal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.20. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran

Bidang	TAHUN					
	2011		2012		2013	
	Sasaran	DPM(000)	Sasaran	DPM(000)	Sasaran	DPM(000)
1	2	3	4	5	6	7
Ter PHK	23	154.000	30	207.500	31	261.500
CTKI	21	395.000	10	200.000	8	155.000
Lulusan Pelatihan	8	97.000	8	80.000	16	334.000
Kesejahteraan Sosial	3	173.000	6	188.000	8	476.500
Pengembangan Pariwisata	6	790.000	4	800.000	5	595.000
Perindustrian	40	1.198.000	23	738.000	26	1.032.000



1	2	3	4	5	6	7
Koperasi dan UKM	29	3.650.000	30	4.590.000	23	4.020.000
KB, PP, dan PA	225	1.215.000	192	1.395.000	255	2.380.000
Pengembangan dan Pengelolaan Pasar	23	230.000	22	142.000	80	1.213.500
Peternakan	65	4.872.000	57	4.648.000	50	4.088.000
TPH	163	5.342.500	158	5.225.000	144	5.152.500
Perikanan	97	2.195.000	92	2.000.000	93	2.330.000
Perkebunan	5	228.000	12	780.000	5	350.000
Kehutanan	2	200.000	1	50.000	1	15.000
Jumlah	710	20.739.500	645	21.043.500	745	22.403.000

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Tabel 3.21. Dana Penyertaan Modal Tahun 2011 – 2013

No	Uraian	TAHUN		
		2011	2012	2013
1.	BPD DIY (Juta Rp)	0	5.500	52.732,93
2.	Bank Sleman (Juta Rp)	3.500	9.298,69	8.847,067
3.	PDAM (Juta Rp)	2.500	3.000	2.000
4.	BUKP (Juta Rp)	0	0	0
	Jumlah (Juta Rp)	6.000	17.798,69	63.580

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Tabel 3.22. Bagian Laba Dana Penguatan Modal Tahun 2011-2013

No	Uraian	TAHUN		
		2011	2012	2013
1.	BPD DIY (Juta Rp)	7.733,01	9.266,17	10.677,38
2.	Bank Sleman (Juta Rp)	2.924,33	3.162,89	4.214,48
3.	PDAM (Juta Rp)	-	0	282,70
4.	BUKP (Juta Rp)	343,77	300,26	376,96
	Jumlah (Juta Rp)	11.001,11	12.729,32	15.491,23

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

f. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal sebagaimana terlampir.

g. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal di Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal berjumlah 23 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan penanaman modal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

h. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp1.006.245.500,00, realisasi Rp981.264.180,00 atau 97,52%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp123.144.999,00 realisasi Rp114.245.190,00 atau 92,77%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp81.387.500,00 realisasi Rp77.206.300,00 atau 94,86%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp21.290.000,00 realisasi Rp21.129.280,00 atau 99,25%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp77.535.000,00 realisasi Rp76.838.340,00 atau 99,10%
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran sebesar Rp317.471.500,00 realisasi Rp309.060.150,00 atau 97,35%
6. Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah, anggaran sebesar Rp385.417.500,00 realisasi Rp382.784.920,00 atau 99,32%.

i. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD, dilanjutkan dengan musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan masukan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, *Small Medium Enterprise Development Center* (SMEDC) UGM dan Lembaga pengabdian masyarakat perguruan tinggi.

j. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal adalah sebagaimana terlampir.

k. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pelayanan perizinan kepada investor belum sepenuhnya mengacu pada konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Solusi yang dilakukan adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan SKPD teknis serta perubahan organisasi terkait dengan pelayanan perijinan.
- 2) Pelayanan pra investasi oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan sosialisasi pelayanan perijinan di masyarakat.
- 3) Calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sleman cukup tinggi tetapi ketersediaan lahan tidak memadai disamping harga tanah yang cukup tinggi. Solusi yang ditempuh adalah dengan menawarkan investasi di bidang industri kreatif dan IT yang minim lahan.
- 4) Masih banyak dijumpai penerima dana penguatan modal yang kurang mematuhi jadwal angsuran pinjaman yang telah disepakati, serta terdapat beberapa penerima dana penguatan modal yang tidak bisa mengembalikan pinjaman antara lain disebabkan karena: meninggal



dunia, bangkrut/jatuh miskin, pindah alamat tanpa diketahui keberadaannya. Solusi yang dilakukan adalah melakukan intensifikasi pemantauan dan penagihan secara intensif, serta perlunya kebijakan pemutihan atau penghapusan piutang dana penguatan modal bagi penerima dana yang betul-betul tidak bisa melunasi, dan penyusunan SOP tentang penyelesaian piutang macet.

- 5) Belum adanya kejelasan tindak lanjut atas sita jaminan bagi penerima dana penguatan modal yang menunggak dan menggunakan agunan. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan tentang sita jaminan bagi penerima dana penguatan modal.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - l) Pengelolaan Dokumen SKPD
 - m) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala taman



- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a) Bimbingan teknis, *workshop*, seminar, lokakarya
 - b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
 - e) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - a) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah
 - b) Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
 - b) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
 - b) Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi bermasalah



b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pengelolaan dan penyediaan surat sejumlah 4.371 surat.
- b) Pembayaran listrik 12 bulan, telepon 12 bulan
- c) Pembayaran bendahara 6 orang, pembuku 1 orang, pengelola barang 1 orang dan pembantu 2 orang
- d) Penyediaan sarana kebersihan kantor dan pembayaran 1 orang tenaga kebersihan 12 bulan.
- e) Pemeliharaan peralatan kerja komputer/laptop 31 unit, mesin ketik 17 unit, AC 11 unit, jaringan LAN 1 unit, soundsystem 3 unit, dan kamera 4 unit.
- f) Penyediaan alat tulis kantor 61 jenis.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis.
- h) Penyediaan *gordyn* 65 m untuk perlengkapan kantor.
- i) Penyediaan makanan dan minuman harian satpam, tamu, dan rapat selama 12 bulan.
- j) Fasilitasi koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah 50 kali dan perjalanan dinas luar daerah 17 kali.
- k) Pembayaran jasa keamanan kantor selama 12 bulan, 3 orang.
- l) Pengelolaan dokumen SKPD selama 12 bulan.
- m) Penyediaan jasa langganan 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengecatan marka halaman 1 kali, taman 1 unit.
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja kendaraan roda empat 5 unit, kendaraan roda dua 12 unit
- c) Perawatan meubelair 140 unit.



3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a) Pelaksanaan pengiriman personil BIMTEK Workshop seminar dan lokakarya 6 orang, Pengiriman BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah 80 orang.
- b) Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian 8 buku dan laporan hasil Penyusunan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional perindag 6 buku.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Laporan bulanan 120 buku, laporan tahunan 10 buku, LAKIP 10 buku, dan capaian kinerja 5 buku.
- b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan bulanan 12 buku dan semesteran 2 buku.
- c) Program kerja 10 buku, target kinerja 5 buku, Renja SKPD 10 buku, DPA 10 buku, DPA Perubahan 10 buku, dan dokumen perubahan renstra 10 buku.
- d) Laporan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan dinas sebanyak 10 buku, laporan monitoring terhadap 32 pelatihan.
- e) Buku profil data SKPD lima tahun terakhir sebanyak 20 buah, pendataan 3 jenis industri.

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- a) Pelaksanaan formalisasi badan usaha kecil dan menengah pada 6 koperasi, sosialisasi prinsip prinsip koperasi terhadap 150 orang
- b) Fasilitasi bimbingan dan penyuluhan untuk UMKM INDAG 6 angkatan

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

- a) Temu usaha perdagangan 40 UMKM, pelaksanaan forum komunikasi IKM 90 orang, forum komunikasi koperasi 40 orang.



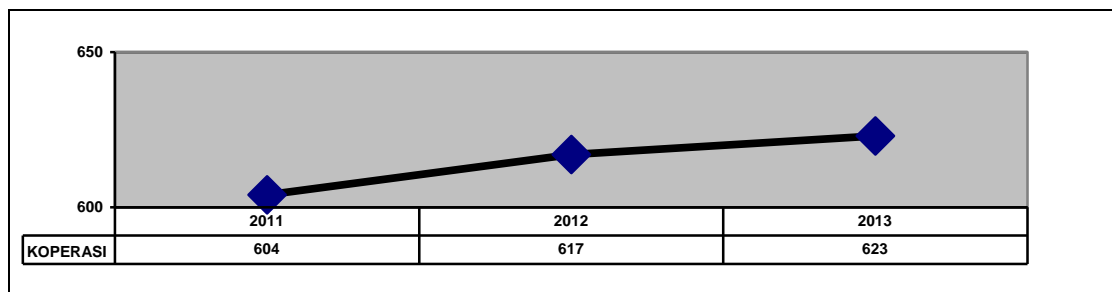
- b) Pelatihan kewirausahaan 80 UMKM, Pelatihan Manajemen SDM untuk 30 IKM, Pelatihan manajemen pemasaran bagi 20 UMKM.
 - c) Diklat pengurus koperasi 30 orang, diklat pengawas koperasi 30 orang, bintek kesehatan koperasi 40 orang, bimbingan manajemen bagi koperasi pasif 15 koperasi.
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- a) Gelar Potensi Koperasi sebanyak 6 KUKM, sarasehan hari koperasi 50 koperasi, promosi tetap produk industri kecil dan menengah di showroom dinas sebanyak 80 IKM, pasar lebaran 60 UMKM, orientasi pengurus dan pengrajin Dekranasda Kabupaten Sleman 8 pengrajin, pameran keliling dekranas, text craft 4 IKM
 - b) laporan monitoring dana penguatan modal sebanyak 1 laporan 10 buku terhadap 760 penerima dana penguatan modal
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- a) Penetapan koperasi berprestasi jenis konsumen, simpan pinjam, produsen sebanyak 20 koperasi, Penetapan koperasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas, dan tidak berkualitas sebanyak 20 koperasi, Penetapan koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat sebanyak 145 koperasi
 - b) Pelaksanaan fasilitasi permasalahan koperasi dan pembubaran koperasi yang bermasalah terhadap 5 kasus dan 5 koperasi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah rata-rata persentase pencapaian target indikator masukan dana sebesar 89,30% dan rata-rata keluaran kegiatan sebesar 98,62% yang meliputi 8 program dan 33 kegiatan.

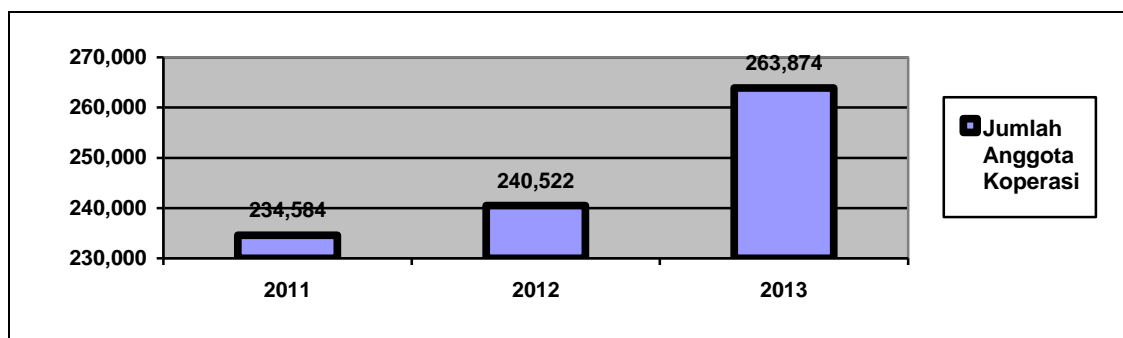
Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu meningkatkan jumlah anggota koperasi, volume usaha koperasi, dan kualitas kelembagaan koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan sebesar 11,10% dari 234.584 orang pada tahun 2012 naik sejumlah 23.352 orang menjadi 263.874 orang pada tahun 2013. Perkembangan volume usaha koperasi juga mengalami kenaikan sebesar 18,72%, dimana pada tahun 2012 sebesar Rp819.373.452.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp153.401.087.000,00 menjadi Rp972.774.539.000,00 pada tahun 2013. Jumlah koperasi mengalami kenaikan sejumlah 6 unit atau 0,97% dari 617 unit pada tahun 2012 menjadi 623 unit pada tahun 2013. Dari total sejumlah 623 unit koperasi pada tahun 2013 tersebut, 573 unit koperasi atau 91,97% adalah koperasi aktif. Jumlah koperasi aktif ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 563 unit dari total koperasi 617 unit atau 91,24%.

Grafik 3.15. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2011-2013



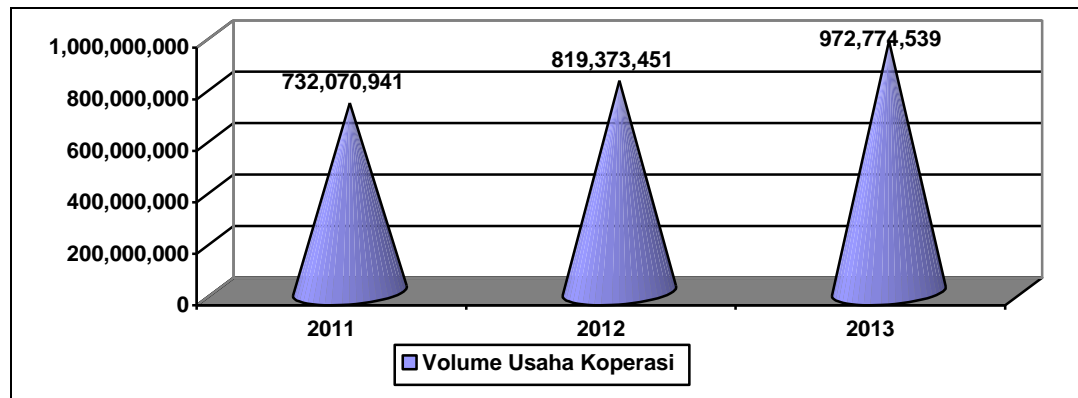
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.16. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2011-2013



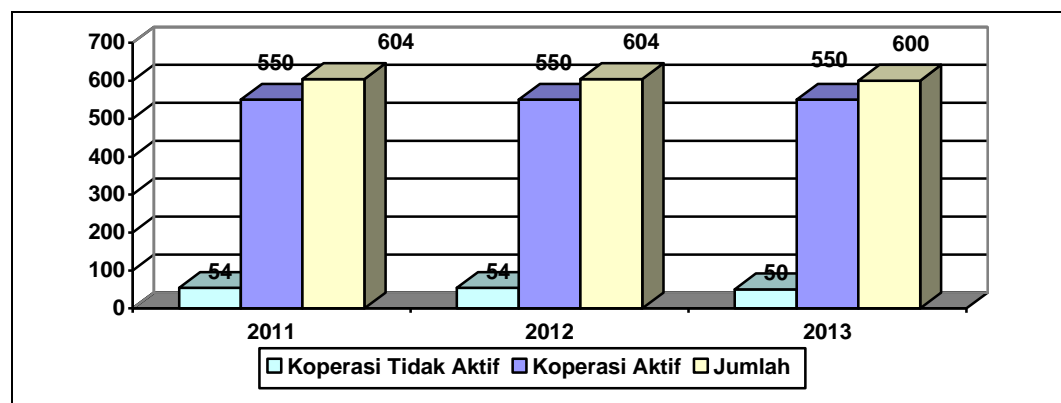
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.17. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2011-2013 (ribu rupiah)



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.18. Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif Tahun 2011-2013



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir.



d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagaimana pada lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebesar Rp1.715.184.750,00 dengan realisasi sebesar Rp1.531.678.437,00 atau 89,30%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp372.057.000,00 realisasi sebesar Rp341.915.803,00 atau sebesar 91,90%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp318.048.000 realisasi sebesar Rp217.713.624,00 atau sebesar 68,45%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp46.006.000,00 realisasi sebesar Rp45.690.000,00 atau sebesar 99,31%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp212.885.000,00 realisasi sebesar Rp202.527.500,00 atau sebesar 95,13%.
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif anggaran sebesar Rp83.865.000,00 realisasi sebesar Rp76.990.000,00 atau sebesar 91,80%.
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp247.396.500,00 realisasi sebesar Rp236.528.000,00 atau sebesar 95,61%.



- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp306.577.250,00 realisasi sebesar Rp287.522.510,00 atau sebesar 93,78%.
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran sebesar Rp128.350.000,00 realisasi sebesar Rp122.791.000,00 atau sebesar 95,67%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil menengah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana pada lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang petunjuk teknis Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi kendala utama dalam pembinaan koperasi khususnya penerbitan badan hukum koperasi. Sehingga pada tahun 2013 hanya dapat diterbitkan 6 badan hukum koperasi, meskipun banyak yang sudah mengajukan penyuluhan badan hukum koperasi. Peraturan tersebut, mengharuskan koperasi melakukan perubahan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Pada saat yang sama, untuk melakukan perubahan AD dan ART harus melalui notaris (masing-masing koperasi harus mengeluarkan biaya tambahan). Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 sekaligus menghimbau kepada para notaris yang berada di wilayah



Kabupaten Sleman untuk dapat memberikan keringanan biaya bagi koperasi yang akan mengurus perubahan AD dan ART.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - l) Pengelolaan dokumen SKPD
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal
 - b) Pengkajian kompetensi kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir



5) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- c) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- d) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- e) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- f) Pengembangan database kependudukan
- g) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
- h) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil
- i) Fasilitasi pembantu pegawai pencatat perkawinan (P4)
- j) Penerbitan surat pemberitahuan NIK dan validasi data
- k) Pelayanan umum dan administrasi kependudukan
- l) Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan yang meliputi surat masuk 952 lembar, surat keluar 1.127 lembar, undangan masuk 632 lembar, dan undangan keluar 119 lembar
- b) Pembayaran langganan listrik, air, telepon dan surat kabar selama 12 bulan
- c) Penyediaan komponen instalasi listrik 12 bulan
- d) Penyediaan administrasi keuangan 24 orang (bendahara, pembantu bendahara, bendahara pengeluaran, pembuku, PPK gaji, bendahara penerima pembantu, penerima kecamatan, pengelola barang, pembantu pengelola barang, pembantu bendahara penerima kabupaten) selama 12 bulan
- e) Penyediaan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan sarana kebersihan kantor 12 bulan
- f) Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan



- g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
 - h) Pengadaaan dokumen blangko kependudukan dan catatan sipil 47 jenis
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan
 - j) Fasilitas perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 bulan
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
 - l) Penataan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) 20 buah, Pengelolaan arsip pada boks arsip 50 buah, penataan buku perpustakaan 200 buah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan gedung kantor 600m² 12 bulan
 - b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (mobil) 5 unit dan kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor) 5 unit
 - c) Perbaikan meja kerja 15 buah dan kursi kerja 25 buah
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Penyertaan pendidikan dan pelatihan 12 bulan
 - b) Pengelolaan kepegawaian 39 orang, pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) 1 orang, pengelolaan Pegawai Harian Lepas (PHL) 5 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan bulanan 12 kali, Laporan tahunan 1 kali, LAKIP 1 kali, dan laporan barang 2 kali
 - b) Laporan keuangan bulanan 12 kali, laporan keuangan tahunan 1 kali, dan catatan atas laporan keuangan 1 kali
 - c) Program kerja 1 dokumen, Rencana Kerja SKPD 1 dokumen, RKA 1 dokumen, DPA 1 dokumen, dan DPPA 1 dokumen, dan Rencana strategis 1 dokumen
 - d) Data Statistik Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis SIAK 25 buku



5) Penataan Administrasi Kependudukan

- a) Evaluasi pelaksanaan rekam data e-KTP 2 kali, Fasilitas perangkat pelayanan e-KTP (*card reader*) 2 unit, perekaman wajib KTP 30.903 wajib KTP
- b) Koordinasi 12 instansi pemerintah dan koordinasi pelaporan perkawinan penduduk muslim dengan 17 Kantor Urusan Agama 4 kali.
- c) Penyediaan data proyeksi dan indikator kependudukan 40 buku
- d) Pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil yang dapat diakses masyarakat 50 buku
- e) Tertib administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk 61.505 lembar, Kartu Keluarga 61.981 lembar, Surat Keterangan Tempat Tinggal 48 lembar, Surat Keterangan Tinggal Sementara 3.526 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk DIY 2.838 lembar, Surat Izin Menjadi Penduduk Luar DIY 6.153 lembar, surat keterangan pindah 6.092 lembar, dispensasi masuk penduduk 246 lembar
- f) *Database* arsip elektronik Akta masuk 125.000 akta
- g) Penerbitan Akta kelahiran 26.850 lembar, Kutipan akta kelahiran terlambat 22.139 lembar, Kutipan akta perkawinan 742 lembar, Kutipan akta perceraian 93 lembar, Kutipan akta kematian 3.876 lembar
- h) Dokumen kependudukan dan catatan sipil 2000 buku
- i) Fasilitas petugas P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan) dan pembinaan wawasan tentang tugas teknis pencatatan perkawinan 40 orang
- j) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan (surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan) 109.850 lembar
- k) Proses pembuatan KTP maksimal 3 hari 61.505 lembar, Proses pembuatan KK maksimal 3 hari 61.981 lembar, proses

pembuatan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) 3.526 lembar di 17 kecamatan se-kabupaten Sleman

l) Verifikasi data kependudukan melalui SAK/SIK 12 bulan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

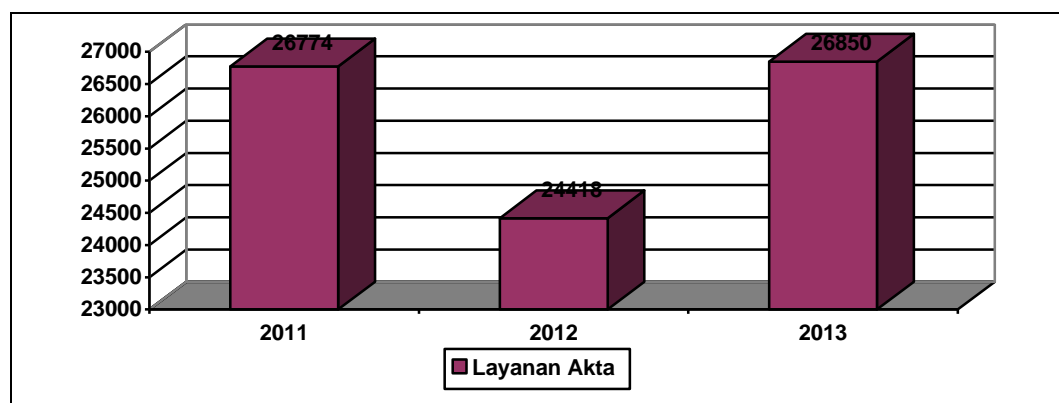
Tabel 3.23. Pencapaian SPM bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

Jenis pelayanan dasar dan Indikator		Target	Batas waktu	Capaian 2013
Pelayanan Dokumen Kependudukan				
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2013	93,19%
2.	Cakupan Penerbitan Kartu keluarga (KK)	100%	2013	100%
3.	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	100%	2013	88,76%
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%	2013	87,81%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil pada layanan akta catatan sipil yang meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian sebesar 9,96% dari 24.418 akta di tahun 2012 menjadi 26.850 di tahun 2013. Layanan Akta Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

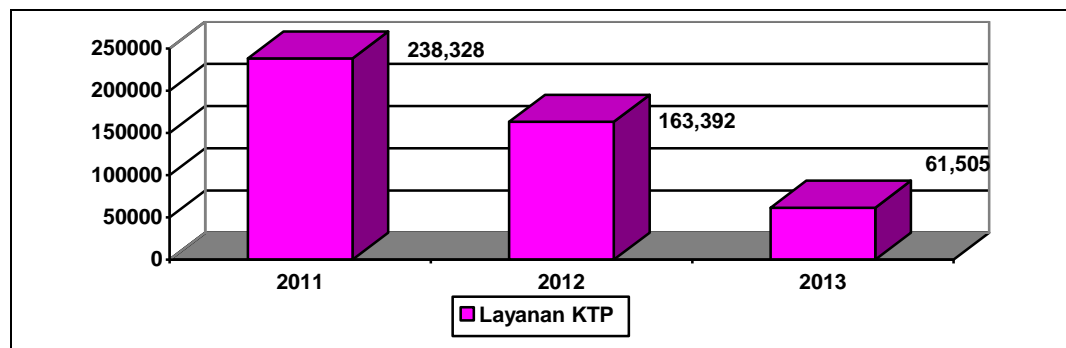
Grafik 3.19. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2011-2013



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2012 menurun sebesar 62,36% dari 163.392 menjadi 61.505 di tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 warga wajib KTP sudah banyak yang melaksanakan perekaman e-KTP, sehingga pada tahun 2013 hanya melanjutkan pelaksanaan layanan rekam e-KTP bagi warga wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman e-KTP pada tahun 2012. Layanan KTP per tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

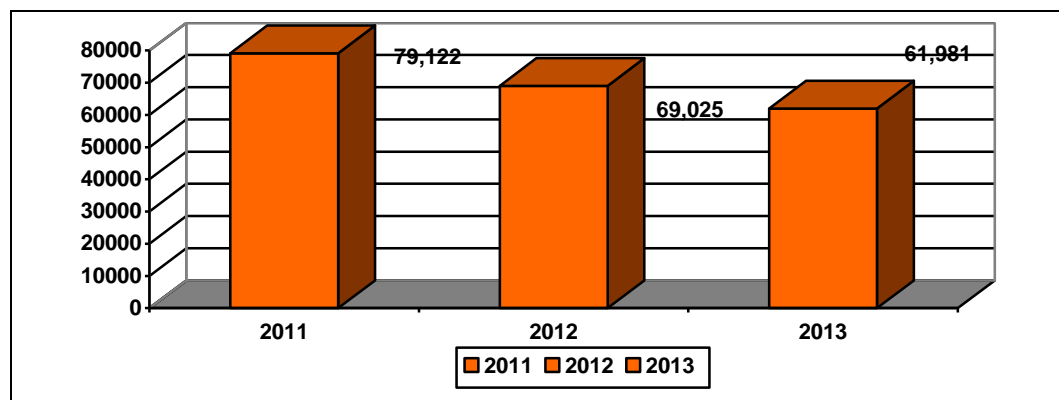
Grafik 3.20. Layanan KTP Tahun 2011-2013



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Layanan Kartu Keluarga juga mengalami penurunan sebesar 10,20% dari 69.025 di tahun 2012 menjadi 61.981 di tahun 2013. Hal ini antara lain karena banyak keluarga baru yang belum mengurus KK karena belum merasa perlu, mereka masih menumpang pada KK lama keluarga masing-masing. Layanan Kartu Keluarga per tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.21. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2011-2013



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh 17 kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 39 orang. Secara rinci sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp4.209.425.050,00 dengan realisasi sebesar Rp4.039.087.721,00 atau 95,95%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp862.874.000,00 realisasi Rp791.135.146,00 atau 91,69%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp241.760.000,00 realisasi Rp228.553.550,00 atau 94,54%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp26.878.500,00 realisasi Rp26.228.250,00 atau 97,58%.



- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp111.815.950,00 realisasi 111.564.500,00 atau 99,78%.
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp2.966.096.600,00 realisasi Rp2.881.606.275,00 atau 97,15%.

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain :

- 1) Perekaman data e-KTP belum mencapai target karena masih adanya data kotor (data penduduk yang sudah meninggal, pindah dan data ganda) dan ketidaksesuaian data e-KTP yang sudah tercetak. Solusi yang dilakukan intensifikasi perekaman e-KTP mobile dan memverifikasi data e-KTP.
- 2) Data kependudukan masih belum valid masih ada NIK yang salah/ganda. Solusi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang data kependudukan.
- 3) Penyusunan laporan informasi kependudukan tidak dapat berjalan secara optimal karena pengisian data formulir F-1.0.1 tidak lengkap



untuk kebutuhan data pilah kependudukan. Solusi yang dilakukan dengan menyusun laporan sesuai dengan data yang dibutuhkan dan mengkondisikan supaya dalam pengisian F-1.0.1 lengkap.

10. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - j) Rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Pengelolaan dokumen SKPD
 - l) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Penyusunan dokumen kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan



- c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
 - e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 (lima) tahun terakhir
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja melalui pelatihan institusional
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
 - c) Monitoring lulusan dan informasi latihan
 - d) Pembinaan LPK
 - e) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non institusional/MTU (Mobile Training Unit)
 - f) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja system swadana
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- a) Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja
 - b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan
 - c) Penempatan tenaga kerja terdaftar
 - d) Fasilitasi padat karya produktif
- 7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI)
 - b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja (K3)
 - d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan
 - e) Pengelolaan bantuan pinjaman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 - f) Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan lembaga Bipartit
 - g) Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit



- h) Fasilitas pemberian Jamsostek bagi tenaga kerja kontrak/honorir
Pembab Sleman

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pelayanan surat menyurat 3.419 surat masuk 2.280 surat keluar
- b) Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan media cetak 12 bulan
- c) Pembayaran jasa pengelola belanja 5 orang, pembuku 1 orang, bendahara penerima 2 orang, pengelola gaji 2 orang, bendahara barang 4 orang
- d) Pelaksanaan kebersihan kantor Dinas dan UPT BLK 12 bulan
- e) Perbaikan peralatan kerja dinas dan UPT BLK komputer 32 unit, laptop 12 unit, printer 28 unit, HT 8 unit dan mesin rumput 1 unit.
- f) Penyediaan alat tulis kantor 2 paket 41 jenis
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 paket 23 jenis
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket 15 jenis dan 1 paket 14 jenis
- i) Penyediaan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu
- j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program
- k) Pelayanan arsip 12 bulan dan pembelian koleksi perpustakaan 4 buku
- l) Penyediaan jasa langganan 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan
- b) Pemeliharaan rutin/berkala dan operasional kendaraan roda 2 (dua) 42 unit, kendaraan roda 4 (empat) 11 unit.
- c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair dinas 50 unit dan UPT BLK 50 unit



- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Pembayaran Pegawai Tidak Tetap 2 orang dan Pegawai Harian Lepas 5 orang; penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) 2 kali bagi 38 orang Pejabat Fungsional; pengelolaan administrasi kepegawaian 114 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a) Laporan bulanan 12 kali, laporan tahunan 1 kali dan LAKIP 1 kali
 - b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 12 kali
 - c) Dokumen perencanaan kerja 10 buku, dokumen RKA 10 buku, dokumen DPA 10 buku, dokumen RKPA 10 buku, dan dokumen DPPA SKPD 10 buku
 - d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 12 bulan
 - e) Penyusunan profil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2012-2013 10 buku dan buku saku profil dinas 2012 100 buku
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a) Pelatihan kerja institusional 8 sub kejuruan yaitu teknik pendingin 240 jpl 1 paket (16 orang); mobil mesin 320 jpl 1 paket (16 orang), processing I 120 jpl 1 paket (16 orang); processing II 120 jpl 1 paket (16 orang); komputer 240 jpl 1 paket (16 orang); akuntansi 240 jpl 1 paket (16 orang); mesin logam 480 jpl 1 paket (16 orang); las listrik 240 jpl 1 paket (16 orang)
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala alat bengkel bermesin 7 kejuruan yaitu teknologi mekanik, aneka kejuruan, otomotif, tata niaga, bangunan, listrik dan pertanian, pemeliharaan gedung bengkel
 - c) Monitoring lulusan pelatihan BLK 209 orang dan promosi pelatihan UPT BLK di 17 kecamatan
 - d) Pembinaan dan monitoring mutu bagi 40 Lembaga Pendidikan dan Keterampilan, penyediaan data LPK yang valid 1 paket, pelaksanaan Forum Komunikasi LPK 1 kali, verifikasi dan pengeluaran ijin operasional LPK bagi 10 LPK

-
- e) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non institusional/MTU (Mobile Training Unit) 16 paket pelatihan pada sub kejuruan jahit I 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Margorejo Kecamatan Tempel, jahit II 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem, bordir 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan, bangunan 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan, gulung dinamo 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, teknisi HP I 160 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik, teknisi HP II 160 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, sepeda motor 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Condongcatur Kecamatan Depok, las karbit I 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman, las karbit II 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Condongcatur Kecamatan Depok, akuntansi 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, teknisi komputer I 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan, teknisi komputer II 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Sardonoarjo Ngaglik, teknisi komputer III 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah, teknisi komputer IV 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Jogotirto Kecamatan Berbah, teknisi komputer V 240 jpl 1 paket (16 orang) di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah
- f) Pelatihan kerja swadana kejuruan Tata Niaga, Listrik, Aneka Kejuruan, Teknik Mekanik, Pertanian, Bangunan dan Otomotif tidak dilaksanakan karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- a) Pembinaan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja bagi pengurus 30 Bursa Kerja Khusus (BKK) 1 kali dan *updating*



-
- data Bursa Kerja Khusus (BKK) 1 paket 30 BKK dan pendampingan 3 BKK
- b) Pembinaan kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 20 orang, monitoring perkembangan usaha tahun 2009, 2010 dan 2011 bagi TKM 60 orang, bantuan modal bagi TKM terseleksi 20 orang
 - c) Penempatan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) 288 orang; penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Lokal (AKL) 2.573 orang; fasilitasi rekomendasi penempatan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) 165 orang; pembinaan dan pengendalian operasional Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/ Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Lembaga Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) 10 lembaga; pelayanan dokumen Antar Kerja I (AKI) dan AK II 11.305 lembar; pengelolaan pelayanan Bursa Kerja On Line (BKOL) 2 jenis; penyebaran informasi pelayanan BKOL 3.150 lembar
 - d) Pelaksanaan padat karya produktif pembuatan kandang ternak sapi 88 orang di 2 lokasi (Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel); dan monitoring kegiatan padat karya 1 kali, data terpilah gender dalam fasilitasi padat karya produktif 1 dokumen
- 7) Program Perlindungan Tenaga Kerja Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- a) Fasilitasi penyelesaian Pemutusan Hubungan Industrial/ Pemutusan Hubungan Kerja 33 kasus (171 orang) dan perselisihan hak 2 kasus (2 orang)
 - b) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Kasus Perselisihan bagi guru dan siswa SMK 10 sekolah



- c) Pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kecelakaan kerja di 10 perusahaan, pelaksanaan Upacara Pembukaan Bulan K3 1 kali (130 orang) di PT. Homeware International Indonesia, koordinasi panitia Pembina K3 30 orang, sosialisasi bahaya kebakaran di tempat kerja 50 perusahaan, bahan percontohan penanggulangan kebakaran 1 paket, evaluasi kecelakaan kerja 15 kasus, alat uji *hydrant/pitout gauge* 1 unit
- d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di 25 perusahaan, identifikasi 25 perusahaan baru yang belum melapor, pengawasan tenaga kerja asing di 15 perusahaan
- e) Pembinaan pengurus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (peminjam) sebagai penanggung jawab cicilan 40 orang, pemberian rekomendasi laporan perkembangan pemanfaatan dan pengembalian pinjaman 8 orang, laporan perkembangan pemanfaatan dan pengembalian pinjaman 1 paket
- f) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama 30 perusahaan, verifikasi 20 Serikat Pekerja/Serikat Buruh 1 kali, pelaksanaan deteksi dini untuk pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 20 perusahaan
- g) Pelaksanaan koordinasi antar unsur tripartit 6 kali, Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dewan pengupahan 24 kali, pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 3 pasar; Sosialisasi Upah Minimal Kabupaten 2014 bagi pekerja dan pengusaha 150 perusahaan
- h) Pengurusan premi dan klaim jamsostek bagi Tenaga Kerja honorer Pemkab Sleman 210 orang, pembinaan jamsostek bagi perusahaan yang belum mengikuti program jamsostek 30 perusahaan, koordinasi pengawas ketenagakerjaan 1 kali

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2011, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.24. Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2012 dan 2013

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target Nasional	Batas waktu	Capaian Sleman	
				2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja				
	a. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	68,75%	81,55%
	b. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	78,96%	61,90%
	c. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60%	2016	100%	48,78%
2.	Pelayanan Penempatan Kerja				
	- Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	61,21%	26,77%
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
	- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	82,61	91,43%
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek				
	- Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	2016	54,18%	61,82%
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan				
	- Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	18,70%	38,01%
	- Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	33,47%	28,40%

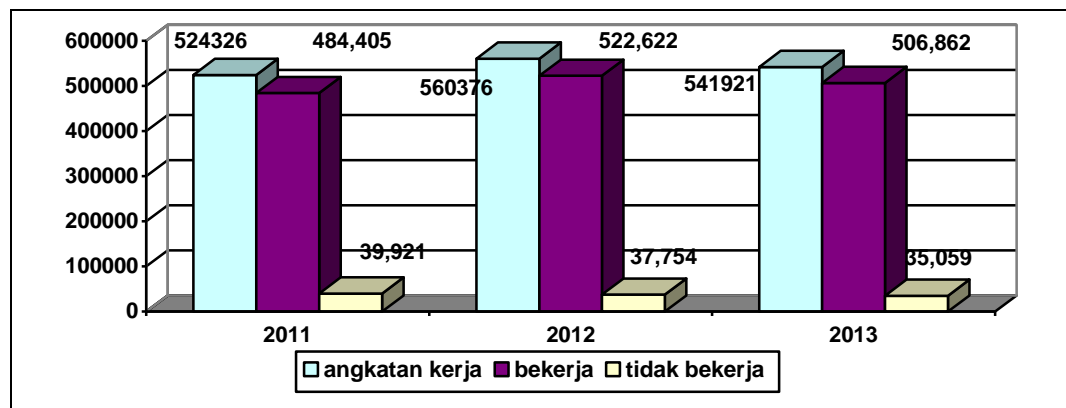
Sumber : Dinas Nakersos

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2013 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 93,53% dari total angkatan kerja sebanyak 541.921 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja naik jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 93,26% dari

sejumlah 560.376 orang tenaga kerja. Hal yang sama juga terlihat pada penurunan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dari 6,74% pada 2012 menjadi 6,47% pada tahun 2013.

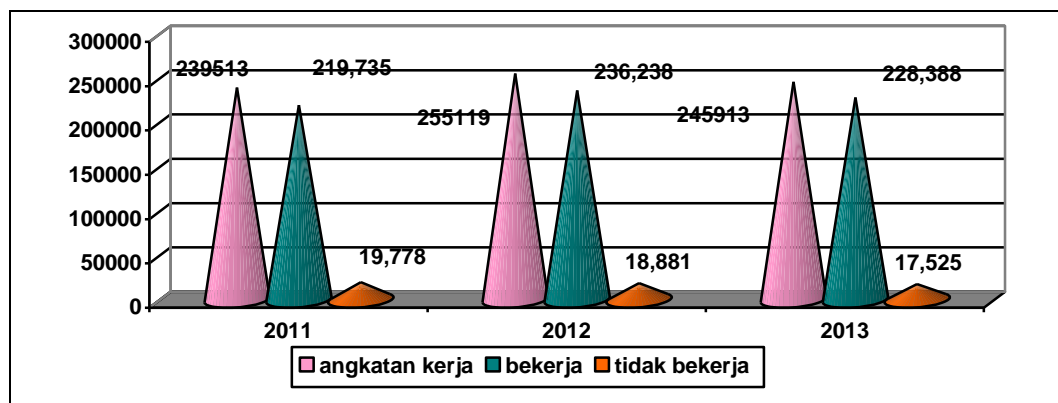
Jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 15.760 orang (3,02%) dari 522.622 orang pada tahun 2012 menjadi 506.862 orang tahun 2013. Besarnya angkatan kerja per tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.22. Angkatan Kerja Tahun 2011-2013



Sumber : Dinas Nakersos

Grafik 3.23. Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2013



Sumber : Dinas Nakersos

Jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat sebanyak 1.080 perusahaan pada tahun 2012 beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman menjadi 1.176 perusahaan pada akhir tahun 2013. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap

di perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 66.319 (termasuk 85 tenaga kerja asing) meningkat dari sebelumnya sebesar 59.423 (termasuk 80 tenaga kerja asing) orang pada tahun 2012 atau jika dipersentasekan maka akan tercatat angka peningkatan sebesar 11,60%. Berikut data jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.25. Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja Indonesia		Tenaga Kerja Asing		Jumlah
			L	P	L	P	
1.	2011	1.031	33.599	22.455	120	48	56.222
2.	2012	1.080	35.456	23.887	56	24	59.423
3.	2013	1.176	40.819	25.415	61	24	66.319

Sumber : Dinas Nakersos

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara) dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2012 adalah sebesar 4.528 orang dan menurun menjadi 3.026 orang pada tahun 2013. Penempatan Tenaga Kerja per tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2011-2013

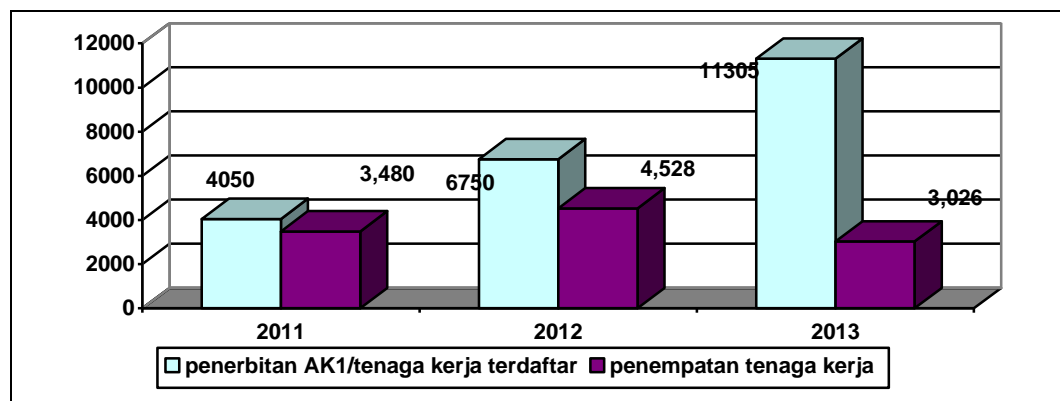
No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	AKL	2.821	4.091	2.573
2	AKAD	183	322	288
3	AKAN	476	115	165
Jumlah		3.480	6.750	3.026

Sumber : Dinas Nakersos

Jumlah tenaga kerja yang tersalurkan tersebut pada tabel di atas pada tahun 2013 mencapai angka 26,77% dari keseluruhan 11.305 orang

pencari kerja. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang tersalurkan mencapai angka 67,08% dari keseluruhan 6.750 orang pencari kerja. Dengan kata lain pelayanan kartu pencari kerja /AK1 (penerbitan kartu AK1) mengalami peningkatan dari 6.750 lembar pada tahun 2012 menjadi 11.305 lembar pada 2013. Namun disisi lain terjadi penurunan penyaluran tenaga kerja dari 4.528 tenaga kerja tersalurkan pada 2012 menjadi 3.026 tenaga kerja tersalurkan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 ada pendaftaran CPNS di beberapa pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan lembaga pemerintah se-Indonesia yang menyebabkan terjadinya lonjakan permohonan penerbitan kartu pencari kerja. Penerbitan Ak1 (tenaga kerja terdaftar) dan tenaga kerja tersalurkan (penempatan tenaga kerja terdaftar) per tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.24. Penerbitan AK1 dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar 2011-2013



Sumber : Dinas Nakersos

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.



d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 19 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketenagakerjaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp2.919.888.650,00 dengan realisasi Rp2.761.482.102,00 atau sebesar 94,57% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp418.713.500,00 dengan realisasi sebesar Rp375.367.823,00 atau sebesar 89,65%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp579.005.500,00 dengan realisasi sebesar Rp546.702.964,00 atau sebesar 94,42%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp174.978.000,00 realisasi sebesar Rp174.953.000,00 atau sebesar 99,99%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp80.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.761.700,00 atau sebesar 99,28%
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, anggaran sebesar Rp970.211.100,00 dengan realisasi sebesar Rp898.922.700,00 atau sebesar 92,65%
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran sebesar Rp321.587.500,00 dengan realisasi sebesar Rp315.186.200,00 atau 98,01%.
- 7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp375.053.050,00 dengan realisasi sebesar Rp370.587.715,00 atau sebesar 98,81%



f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan melalui mekanisme musrenbang. Untuk memperluas kesempatan kerja, proses perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, dibangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta sehingga memperlancar penempatan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Sebagian angkatan kerja belum mempunyai kompetensi. Solusi yang dilakukan adalah diadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar dan melakukan kerjasama dengan dunia usaha.
- 2) Fasilitas pelatihan terutama yang berkaitan dengan teknologi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Solusi yang dilakukan dengan penggantian sarana prasarana pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi (35.059 orang angkatan kerja yang tidak bekerja), dan perluasan lapangan kerja yang belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Solusi yang dilakukan adalah dengan mempermudah, membuka akses dan menyebarkan informasi peluang/bursa kerja. Selain itu melalui program peningkatan kesempatan kerja dilakukan pembinaan, penyebaran informasi pada bursa kerja khusus, pembinaan



kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri, pemberian bantuan modal usaha bagi tenaga kerja mandiri, fasilitasi penempatan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Daerah, Angkatan Kerja Lokal dan Angkatan Kerja Antar Negara serta fasilitasi padat karya produktif.

- 4) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar, yang disertai dengan berkembangnya "*local minded*" pada sebagian pencari kerja, sehingga kurang tertarik untuk bekerja di luar daerah. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperluas jaringan informasi lowongan kerja melalui sistem on line, pasar kerja keliling (sarkeling), pendampingan tenaga kerja mandiri, pinjaman modal lunak bagi pekerja ter-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan penguatan modal bagi calon TKI (tenaga kerja indonesia).

13. Urusan Ketahanan Pangan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa telekomunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Pengelolaan dokumen SKPD
 - l) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan lainnya.
 - b) Pengelolaan dokumen kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD
 - e) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - a) Penanganan daerah rawan pangan
 - b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 - c) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 - e) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - f) Pengembangan desa mandiri pangan
 - g) Pengembangan lumbung pangan desa
 - h) Pengembangan perbenihan/pembibitan
 - i) Pengembangan Sistem Informasi Pasar
 - j) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - k) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.
 - l) Penyuluhan sumber pangan alternatif
 - m) Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan
 - n) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk peternakan
 - o) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura
 - p) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida.



b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan wajib ketahanan pangan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengiriman surat/dokumen 12 bulan
 - b) Langganan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar 12 bulan
 - c) Tunjangan pengelola anggaran dan pengelola barang selama 12 bulan
 - d) Bahan dan alat kebersihan kantor 6 unit, Puskesmas 7 unit dan UPT 12 unit
 - e) Perbaikan mesin ketik, LCD, alat laboratorium, pompa air, wireless, AC 1 PK – 1,5 PK, mebelair, komputer, Laptop, printer laserjet, printer inkjet dan antena jaringan internet 1 paket.
 - f) Alat tulis kantor 12 bulan
 - g) Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
 - h) Komponen alat listrik dan elektronik 44 unit
 - i) Makanan dan minuman rapat 12 bulan
 - j) Perjalanan dinas 12 bulan
 - k) Pendataan, penataan dokumen 1 paket, pengelolaan perpustakaan dinas dan UPT 1 paket serta bimbingan teknis kearsipan 1 angkatan
 - l) Pembayaran rekening surat kabar/majalah selama 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44 unit serta pembayaran sewa tanah 15 lokasi dan pembayaran PBB
 - b) Operasional BBM dan pemeliharaan kendaraan roda dua 225 unit dan roda empat 13 unit
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Seminar, lokakarya, workshop, kursus, pelatihan 1 paket; Magang pemberdayaan petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian 1 kali



- b) Penerbitan SK kenaikan gaji berkala 182 orang, pengusulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional 67 orang, pengusulan pegawai pensiun 17 orang, pengusulan pegawai penerima penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun untuk 20 orang, penyusunan DP3 369 orang, pembayaran pegawai honorer daerah 7 orang dan honorer harian pegawai tidak tetap 31 orang, penyusunan angka kredit penyuluh 112 orang, penyusunan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan pengiriman angka kredit PMHP ke Kementerian Pertanian 15 orang serta penyusunan angka kredit medik veteriner 17 orang dan paramedik veteriner 9 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) LAKIP 1 dokumen, LPPD 1 dokumen , Annual Report 1 dokumen, laporan kinerja bulanan 12 dokumen, laporan kinerja tiga bulanan 4 dokumen dan laporan kinerja tahunan 1 dokumen
 - b) Laporan keuangan bulanan 12 dokumen, laporan keuangan semesteran 2 dokumen, laporan keuangan tahunan 1 dokumen, CaLK semesteran dan tahunan 3 dokumen
 - c) Renja SKPD 1 dokumen, RKA 1 dokumen, DPA 1 dokumen, penetapan kinerja 1 dokumen, RKA Perubahan 1 dokumen, DPA perubahan 1 dokumen, program kerja pertanian, perikanan dan kehutanan 1 dokumen, target OPD 1 dokumen, rencana kinerja tahunan 1 dokumen serta revisi renstra 1 dokumen
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan 8 kali
 - e) Profil Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1 dokumen, profil keluarga TPH 1 dokumen , profil keluarga Peternakan 1 dokumen, profil keluarga Perikanan 1 dokumen, keluarga kehutanan dan perkebunan 1 dokumen dan profil keluarga ketahanan pangan dan penyuluhan 1 dokumen



-
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
- a) Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 paket dan penanganan Daerah Rawan Pangan 1 paket untuk 10 kelompok masyarakat di Desa Potensi Rawan Pangan
 - b) Dokumen Pola Konsumsi Pangan 1 paket, Dokumen Neraca Bahan Makanan Kabupaten Sleman 1 paket.
 - c) Pemanfaatan pekarangan untuk lahan pangan 10 kelompok dan fasilitasi pendampingan pemanfaatan pekarangan 10 kelompok di desa pelaksana Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat melalui pembinaan gapoktan LAPM 7 gapoktan, koordinasi gapoktan 1 kali dan koordinasi Gapoktan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) tingkat UPT BP3K 3 UPT
 - e) Bimbingan pengolahan hasil pertanian 1 angkatan, Bimbingan pengemasan produk olahan 1 angkatan, Manajemen mutu produk olahan dan produk segar 1 angkatan, Bimbingan Teknis panen dan pasca panen kakao 1 angkatan serta Pelatihan manajerial usaha tani komoditas kelapa 1 angkatan
 - f) Pengembangan Desa Mandiri Pangan melalui pelatihan kapasitas lembaga keuangan desa mandiri pangan 2 angkatan dan pelatihan teknis kelompok afinitas 2 angkatan
 - g) Pengembangan Lumbung Pangan Desa melalui Pelatihan manajemen lumbung pangan desa 1 angkatan, Apresiasi Lumbung Pangan Desa 1 kali, Penilaian lumbung pangan terbaik 1 kali dan Pemberian penghargaan lumbung pangan terbaik 1 paket
 - h) Pengembangan perbenihan/perbibitan melalui Sekolah lapang perbenihan padi 2 kelompok, Percontohan/ penanaman tanaman padi untuk perbenihan 4 Ha dan informasi perbenihan 1 kali
 - i) Pengembangan Sistem Informasi Pasar melalui Pemantauan harga pangan masyarakat 52 kali dan Penyusunan laporan harga pangan masyarakat 12 kali



- j) Pendampingan mutu dan keamanan pangan produk olahan 8 kelompok, uji laboratorium produk segar 6 kelompok, uji laboratorium produk segar 1 unit, Bimbingan penerapan jaminan mutu produk olahan keripik salak 2 kelompok dan bimbingan penerapan jaminan mutu produk segar salak 2 kelompok
- k) Pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas padi dan palawija 1 unit, Sekolah lapang PTT 6 unit dan Pengadaan sarana prasarana produksi pertanian 8 unit
- l) Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan lokal di sekolah 2 kali dan Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 kali
- m) Koordinasi ketahanan pangan tingkat kabupaten 2 kali, fasilitasi kegiatan penilaian ketahanan pangan 3 paket dan pemberian penghargaan ketahanan pangan 3 paket
- n) Peningkatan produksi, produktivitas mutu produk peternakan ayam buras dan sapi potong di Kecamatan Mlati dan Ngaglik 5 kali
- o) Pendampingan kelompok tani hortikultura 8 kelompok, peningkatan mutu sayuran 1 unit, peningkatan mutu jamur 6 kelompok, pelatihan pertanian perkotaan 1 paket, sekolah papang budidaya cabai 2 kelompok dan pengembangan biofarmaka 8 paket.
- p) Pemantauan dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi bagi petani 12 kali dan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten dan lapangan 1 paket.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebagaimana buku lampiran).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 . Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011-2013

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahun 2015 (%)	Hasil Capaian Tahun (%)		
				2011	2012	2013
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi Per Kapita	140,00	103,67	127,07	124,98
		2 Ketersediaan Protein per kapita	141,00	112,50	91,78	110,29
		3 Penguatan Cadangan Pangan	60,00	95,00	100,00	112,50
2	Distribusi dan Akses Pangan	4 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90,00	92,31	100,00	144,93
		5 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90,00	96,67	100,10	142,31
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,00	98,81	90,81	107,47
		7 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80,00	100,00	97,00	120,83
4	Penanganan Kerawanan Pangan	8 Penanganan Daerah Rawan Pangan	60,00	100,00	100,00	128,89

Sumber: Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Pencapaian hasil pada 8 (delapan) indikator SPM Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 menunjukkan capaian hasil melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Kecuali indikator ketersediaan energi per kapita yang mengalami penurunan capaian hasil 127,07% pada tahun 2012 menjadi 124,98% pada tahun 2013 akibat adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman, ketujuh indikator SPM Ketahanan pangan lainnya menunjukkan peningkatan capaian hasil tahun 2013 dibandingkan dengan capaian hasil tahun 2012.

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.28. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan 2011 - 2013

No	Indikator	Pencapaian Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Surplus beras (ton)	63.865	110.513	107.081,58
2.	Produktivitas padi (kw/ha)			
	a. Padi sawah	56,93	67,94	63,85
	b. Padi ladang	30,51	30,77	33,43
3.	Ketersediaan ikan konsumsi (kg/kapita/tahun)	27,78	28,65	29,79
4.	Ketersediaan protein hewani (kg/kapita/tahun)	16,79	16,86	17,50
5.	Harga Beras di Kab. Sleman			
	a. Harga tertinggi	7.775	8.198	8.213
	b. Harga terendah	6.092	6.703	7.881
	c. Rerata harga beras	6.933	7.536	7.550
6.	Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga lebih dari 25% dari rerata harga pasar	0 (Stabil)	0 (Stabil)	0 (Stabil)
7.	Konsumsi beras (kg/kapita/tahun)			
	a. Nasional	120,00	120,00	120,00
	b. Kabupaten Sleman	63,70	63,70	63,70
8.	Kekurangan Energi Protein (KEP)% KEP < 15% = Resiko rawan pangan gizi ringan	8,77	7,34	7,01

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pada tahun 2013 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung beras di Provinsi DIY. Surplus beras tahun 2013 sebanyak 107.081,58 ton mengalami penurunan 3,10% dibandingkan dengan surplus beras tahun 2012 sebanyak 110.513 ton. Keberhasilan mempertahankan surplus beras pada tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Program ini didukung dengan kegiatan peningkatan produksi dan mutu produk pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; sekolah lapang petani; peningkatan kemampuan lembaga petani; penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam, Bimbingan *Standar Procedure Operational–Good Agriculture Practices* (SPO-GAP) dan penerapan *System Rice Intensification* (SRI).

Produktivitas padi pada tahun 2013 sebanyak 63,85 kuintal GKP/Ha turun dari produktivitas tahun 2012 sebanyak 67,94 kuintal GKP/Ha. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi pangan pokok (beras) dari 311.378 ton Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2013 menjadi 303.292 ton GKP pada tahun 2013 dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan luas serangan:

- a. Tikus : 4.697 Ha
- b. Puso (tikus) : 594 Ha
- c. Penggerek Batang : 3.565 Ha
- d. *Bacterial Leaf Blight* (BLB) : 1.528 Ha
- e. *Blast* : 330 Ha

Untuk konsumsi beras per kapita per tahun tidak mengalami perubahan dari tahun 2008 hingga 2013 sebanyak 63,70 kg/kapita/tahun jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 120 kg/kapita/tahun. Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai mengonsumsi sumber karbohidrat non beras.

Ketersediaan ikan konsumsi perkapita di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan, pada tahun 2012 ketersediaan ikan per kapita per tahun sebesar 28,65 kg dan pada tahun 2013 meningkat 3,98% menjadi 29,79 kg. Tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Provinsi DIY yaitu sebesar 20,00 kg per kapita untuk tahun 2013. Peningkatan ketersediaan ikan konsumsi di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan, rumah makan/restoran ikan dan UKM yang mengolah berbagai produk olahan pangan berbahan baku ikan serta didukung peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Tingkat ketersediaan protein hewani per kapita per tahun mengalami peningkatan 3,80% dari 16,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2012 menjadi 17,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2013.

Berdasarkan Analisis Data Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman pada tahun 2012 termasuk peta hijau yang berarti wilayah Kabupaten Sleman mempunyai tingkat resiko kerawanan pangan dan gizi ringan.

Berdasarkan hasil analisis komposit meliputi data ketersediaan pangan, data akses pangan dan data pemanfaatan pangan, ditetapkan desa yang berpotensi rawan pangan dan gizi tahun 2011 dan tahun 2012 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Desa Potensi Rawan Pangan dan Gizi Tahun 2011 dan 2012

Tahun 2011	Tahun 2012
1. Desa Wukirsari , Kec. Cangkringan	1. Desa Wukirsari , Kec. Cangkringan
2. Desa Glagaharjo, Kec. Cangkringan	2. Desa Glagaharjo, Kec. Cangkringan
3. Desa Argomulyo, Kec. Cangkringan	3. Desa Argomulyo, Kec. Cangkringan
4. Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan	4. Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan
5. Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan	5. Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan
6. Desa Caturtunggal, Kec. Depok	
7. Desa Condongcatur, Kec. Depok	
8. Desa Catuharjo, Kec. Sleman	
9. Desa Merdikorejo, Kec. Tempel	
10. Desa Sendangadi, Kec. Mlati	
11. Desa Sinduadi, Kec. Mlati	
12. Desa Minomartani, Kec. Ngaglik	

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penetapan 5 (lima) desa potensi rawan pangan dan gizi di wilayah Kecamatan Cangkringan pada Tahun 2012 lebih dipengaruhi pencapaian angka skor 3 (peta merah adalah persentase jumlah KK Miskin pada masing-masing desa melebihi 40%). Sleman telah menindaklanjuti hasil pemetaan situasi pangan dan gizi tahun 2012, dengan melaksanakan berbagai bentuk dan metode intervensi penanganan masalah kerawanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013.

Adapun beberapa program/kegiatan intervensi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Tim Pangan Kecamatan dan Tim Pangan Desa serta didukung oleh berbagai unsur akademisi, pihak swasta dan masyarakat pemerhati pangan pada tahun 2013, meliputi:

1. Fasilitasi daerah rawan pangan dan gizi
2. Fasilitasi desa mandiri pangan
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Penguatan kelembagaan akses pangan masyarakat, dan
5. Fasilitasi kegiatan PNPM Mandiri

terbukti mampu menurunkan jumlah desa potensi rawan pangan dan gizi dari 12 desa pada tahun 2011 menjadi 5 desa pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebanyak 4 kategori dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2013 sebanyak 9 kategori. Adapun data prestator penghargaan peningkatan ketahanan pangan Tingkat Nasional meliputi:

Tabel 3.30. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Thn 2013

No	Kategori	Penerima Penghargaan
1	Pembina Ketahanan Pangan	Drs. Hadjid Badawi Kepala Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir
2	Pelayanan Ketahanan Pangan	Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc. Fakultas Pertanian – Universitas Gadjah Mada
3	Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Masyarakat	Gapoktan SIDOMULYO Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean
4	Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan untuk pengembangan Industri dan Perakit Teknologi Pangan	Kelompok Wanita Tani RATU MULYO Pelemgurih, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping.

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 3.31. Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2013

No	Kategori	Penerima Penghargaan
1	Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saing	Kelompok Wanita Tani SERUNI Gamelan, Desa Sendangtirto, Kec. Berbah.
2	Penghargaan ABDITANI - Kategori Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi	a. UPT BP3K Wilayah VIII , Kecamatan Prambanan b. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
3	Penghargaan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Nasional	Koperasi Peternakan SARONO MAKMUR Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan
5	Penghargaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Berprestasi Tingkat Nasional	P4S MERAPI FARMA HERBAL Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem (Predikat Tingkat Utama)
6	Penghargaan Adhibhakti Mina Bahari – Kategori Kinerja Kelompok Budidaya Ikan Nila/Mas/Gurami	Kelompok Budidaya Ikan TEGAL MAKMUR Kronggahan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping. (Juara 1)
7	Penghargaan Adhibhakti Mina Bahari – Kategori Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Kelompok MINA NGUDI LESTARI Nayan, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok (Juara Harapan 1)
8	Penghargaan Kelompok Peternak Sapi Potong Berprestasi	Kelompok Ternak NGUDI MAKMUR Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik.
9	Penghargaan Penyuluh Kehutanan Berprestasi – Kategori Lomba Wana Lestari	Sri Mundayati, SP PPL Kehutanan – UPT BP3K Kecamatan Pakem. (Juara I)

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, didukung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Secara terperinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 28 orang. Secara rinci sumberdaya manusia penyelenggara urusan ketahanan pangan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan tahun 2013 sebesar Rp4.012.220.600,00 dengan realisasi Rp3.797.194.670,00 atau 94,64%. Secara terperinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Rp598.065.000,00 - Realisasi Rp581.633.511,00 atau 97,25%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran Rp1.213.476.000,00 - Realisasi Rp1.101.675.859,00 atau 90,79%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Anggaran Rp599.253.750,00 - Realisasi Rp596.758.750,00 atau 99,58%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, Anggaran Rp177.345.000,00 - Realisasi Rp175.024.350,00 atau 98,69%
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Anggaran Rp1.424.080.850,00 - Realisasi Rp1.342.102.200,00 atau 94,24%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pengidentifikasian masalah dan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan

secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi oleh Petugas di UPT BP3K yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan secara multi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan melalui jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: perguruan tinggi negeri maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan swasta serta dengan balai pusat penelitian bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana pada lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Penyusutan luas lahan produktif menyebabkan penurunan areal tanam yang berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah mengendalikan laju alih lahan pertanian melalui pengetatan perijinan dan peningkatan mutu intensifikasi.
- 2) Penurunan produktivitas maupun produksi tanaman pangan terutama padi disebabkan terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman seluas 10.714 Ha pada tahun 2013. Solusi yang dilakukan dengan mengurangi penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman.
- 3) Terdapat 5 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan dari keseluruhan 86 Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang tergolong kategori Desa Potensi Rawan Pangan dan Gizi, lebih disebabkan pada indikator akses pangan (presentase KK miskin melebihi 40% pada tahun 2012).



Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan intervensi yang difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan jumlah KK miskin, melalui kegiatan Fasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Fasilitasi Desa Mandiri Pangan, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat serta Penguatan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat pada tahun 2013.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a) Advokasi dan fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi perempuan.
 - b) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA).
 - c) Pemetaan potensi organisasi dan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - d) Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
 - e) Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
 - b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - c) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Bidang perekonomian.
 - d) Peringatan Hari Anak Nasional.
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan



- a) Pembinaan organisasi perempuan
- b) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
- c) Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria.

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terealisasi melalui sosialisasi antisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sosialisasi UU perlindungan anak 80 orang dan pemilihan duta anak daerah 10 anak.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a) Koordinasi dan penyusunan profil gender 15 dokumen
 - b) Fasilitasi Forum penanganan KDRT, *trafficking*, dan fasilitasi P2TPA
 - c) *Data base* organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 1 dokumen, dan pelaksanaan gerakan sayang ibu 17 kecamatan
 - d) Fasilitasi forum komunikasi anak tingkat kabupaten dan kecamatan, penyusunan database profil anak 10 dokumen, fasilitasi taman pintar dan desa ramah anak 3 desa, penyusunan indikator penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) kecamatan 30 dokumen dan koordinasi kecamatan layak anak 17 kecamatan
 - e) Pembinaan kepada PKK 17 kecamatan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pembinaan dan Pembentukan desa Perempuan Indonesia Mandiri (PRIMA)
 - b) Pelatihan bagi pendamping korban KDRT 75 orang dan pembinaan pengurus pokja 50 orang serta dokumen pencatatan KDRT 10 dokumen

- c) Pembinaan kepada PKK padukuhan 17 kelompok dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 120 orang
- d) Peringatan Hari Anak Nasional di tingkat kabupaten dan kecamatan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan:
 - b) Sarasehan bagi organisasi perempuan dalam rangka Hari Ibu 250 orang, puncak peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini
 - c) Pameran hasil karya perempuan di tingkat kabupaten dan propinsi 2 kali
 - d) Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria 2 kali dan penyusunan dokumen data terpilah gender 1 dokumen

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.32. Pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target Nasional	Batas waktu	Capaian nilai (%)
1	2	3	4	5
1.	Penanganan pengaduan/ korban kekerasan terhadap perempuan dan anak <ul style="list-style-type: none">- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	100%
	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan ketersediaan petugas di Unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.	100%	2014	100%



1	2	3	4	5
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	100%
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	100%
	- Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	100%
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
	- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	100%
	- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	100%
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	85%
	- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	100%

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain ditandai oleh penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dilakukan secara lintas bidang yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

Tabel 3.33. Indikator IPG Kabupaten Sleman 2011 dan 2012

No	Uraian	2011	2012
Komponen IPG			
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,86	76,97
2.	Angka Melek Huruf (%)	89,76	92,01
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,97	9,97
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%)	0,38	0,37
Indikator IPG			
1.	Kesehatan	86,43	86,62
2.	Pendidikan	82,00	83,50
3.	Pendapatan	55,81	57,18
IPG		74,75	75,76

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Data yang digunakan merupakan data tahun 2012 karena data indikator IPG Tahun 2013 belum selesai dilakukannya. Pada tahun 2011, angka Indeks Pembangunan Gender mencapai 74,75, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 75,76. Nilai IPG kabupaten Sleman berada di peringkat 2 se-DIY.

Ketimpangan gender ditunjukkan dengan perhitungan selisih antara nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). Apabila nilai IPG sama dengan IPM artinya tidak ada ketimpangan gender.

Tabel 3.34. Ketimpangan Gender di Kabupaten Sleman Tahun 2011 dan 2012

No	Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG	Ketimpangan Gender
1.	2011	78,79	74,75	4,04
2.	2012	79,39	75,76	3,63

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Tahun 2011 angka ketimpangan gender 4,04 sedangkan tahun 2012 angka ketimpangan gender 3,63. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kabupaten Sleman masih terjadi ketimpangan gender tetapi angka ketimpangannya relatif kecil dan menunjukkan mengalami penurunan. Dengan masih adanya ketimpangan gender maka di masa mendatang diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan gender.



c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang uraian tugas struktur dan fungsi organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 11 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.667.858.500,00 realisasi Rp1.640.595.772,00 atau 98,37%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Kerasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, anggaran sebesar Rp139.830.000,00 realisasi 139.394.200,00 atau 99,69%.



- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, anggaran sebesar Rp1.306.284.000,00 realisasi Rp1.281.190.611,00 atau 98,08%.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp130.120.000,00 realisasi Rp129.071.661,00 atau 99,19%.
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, anggaran sebesar Rp91.624.500,00 realisasi Rp90.939.300,00 atau 99,25%.

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunjang dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Data dan inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun usulan program dan kegiatan.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PM dan PP adalah sebagaimana lampiran I.

f. Permasalahan dan Solusi

- 1) Masih lemahnya jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender. Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan koordinasi penanganan permasalahan gender di daerah.
- 2) Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi

terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak. Selain itu juga dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- 3) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan keberdayaan perempuan, menggiatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat serta meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Salah satu yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman adalah dengan penerapan anggaran responsif gender (ARG).

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan langganan.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat.
 - j) Rapat koordinasi dan konsultasi.
 - k) Pengelolaan dokumen SKPD.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.



-
- d) Pemeliharaan rutin/berkala taman.
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - a) Pengkajian kompetensi kepegawaian.
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan.
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
 - d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD.
 - e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir.
 - 5) Program Keluarga Berencana
 - a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
 - b) Hari Keluarga Nasional.
 - c) Fasilitasi pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja
 - e) Pembinaan dan pengendalian program KB.
 - f) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu.
 - 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE tentang KRR.
 - 7) Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan konseling KB
 - 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri.
 - a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
 - b) Pembinaan bina keluarga sejahtera
 - c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
 - 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat.



- 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.
- 11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
- 12) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu dengan kegiatan pembentukan model operasional BKB Posyandu Padu.

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Layanan surat menyurat 12 bulan
 - b) Pembayaran jasa telepon, air, listrik, dan media cetak 12 bulan
 - c) Pengelolaan keuangan 12 bulan
 - d) Penyediaan alat kebersihan/bahan pembersih kantor dan pembayaran tenaga kebersihan 12 bulan
 - e) Perbaikan peralatan kerja 4 macam
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 37 macam
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26 macam
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 macam
 - i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu 12 bulan
 - j) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi 29 kali
 - k) Pengelolaan kearsipan SKPD berdasarkan SKPB 8 jenis
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala 2 unit gedung kantor seluas 1.292 m²
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda dua 84 buah dan kendaraan roda empat 8 buah
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30 unit
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala taman 12 bulan



- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan administrasi kepegawaian 12 bulan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD dan laporan bulanan dan tahunan
 - b) Penyusunan laporan keuangan 12 kali
 - c) Penyusunan rencana strategi, rencana kerja dan RKA/DPA SKPD 25 dokumen
 - d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD 10 kali
 - e) Penyusunan profil data SKPD 10 buku dan CD 8 keping
- 5) Program Keluarga Berencana
 - a) Pengadaan almari alat kontrasepsi 9 unit, pembangunan balaii BKB 3 unit, pengadaan sarpras balai penyuluh KB 3 paket, *obsgyn bed* 10 unit, KIE kit 50 unit, implant kit 50 unit dan BKB kit 86 unit
 - b) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional
 - c) Fasilitasi pelayanan KIE melalui siaran radio 1 kali, umbul-umbul 20 buah, spanduk 1 buah, backdrop 1 buah, leaflet 500 lembar, stiker 500 lembar dan banner 2 buah serta fasilitasi operasional KB KS 86 desa
 - d) Fasilitasi pelayanan KB-KR 7 kali dan pengembangan jaringan kerja 25 puskesmas
 - e) Bimbingan petugas KB 17 kecamatan 86 desa dan koordinasi/konsolidasi program 17 kecamatan
 - f) Pelaksanaan rangkaian Bhakti TNI KB Terpadu
- 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja terealisasi melalui advokasi dan KIE tentang KRR berupa talkshow 1 kali mencakup 130 orang
- 7) Program Pelayanan Kontrasepsi terealisasi melalui pelayanan konseling KB berupa *talkshow* 1 kali dan Jambore Penyuluh Keluarga Berencana 1 kali



- 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - a) Evaluasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 4 kali
 - b) Pembinaan dan evaluasi bina keluarga sejahtera 86 kelompok Kesatuan Gerak PKK KB Kes 1 kali dan sosialisasi pencegahan perceraian untuk ketahanan keluarga dan penguatan kelembagaan (BKB,BKR,BKL)
 - c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di 14 desa, pembinaan 102 kelompok
- 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat terealisasi melalui penyuluhan tentang kesehatan ibu, bayi dan anak bagi 120 orang yang terwadahi dalam kelompok masyarakat
- 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR terealisasi melalui Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 4 kali mencakup 17 kecamatan, sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini 3 kali, pembentukan dan penguatan kelompok Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) 17 kecamatan
- 11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga terealisasi melalui pelatihan pendamping kelompok bina keluarga sejahtera 68 kelompok
- 12) Program Pengembangan Model Operasional BKB melalui pembentukan forum keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu 17 kecamatan dan pembentukan tim pokjanal kabupaten

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

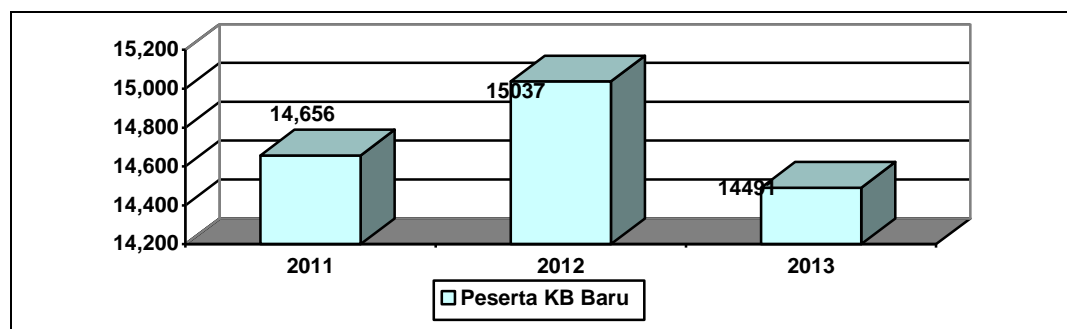
Tabel 3.35. Pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target Nasional	Batas waktu	Capaian Sleman
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)			
	- Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	2014	0,6%
	- Cakupan sasaran Pasangan usia subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014	79,31%
	- Pasangan Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Umet Need</i>)	5%	2014	9,86%
	- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014	86,57%
	- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	2014	89%
	- Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	2014	141%
2.	Penyediaan Alat dan Kontrasepsi			
	- Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	2014	2,8%
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro			
	- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan	100%	2014	100%

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Program dan kegiatan di bidang KB dapat melayani peserta KB baru sebanyak 14.491 peserta. Perkembangan peserta KB dalam tiga tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam berikut:

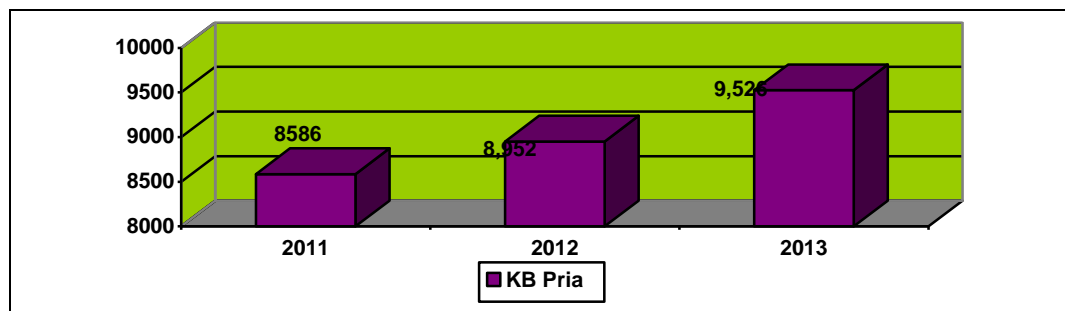
Grafik 3.25. Perkembangan Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2011 – 2013



Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Keikutsertaan KB pria mengalami peningkatan dari 8.952 peserta pada tahun 2012 meningkat menjadi 9.526 peserta pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 6,41% atau 574 peserta. Perkembangan keikutsertaan KB pria dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.26. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria Tahun 2011-2013



Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain :

- 1) Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 2) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
- 3) Juara I Tingkat Provinsi pada Lomba Kader BKB
- 4) Juara I Tingkat Provinsi pada Lomba KB Lestari 10 tahun dan 20 tahun
- 5) Juara I Tingkat Provinsi pada Lomba Bidan Pelopor
- 6) Juara I Tingkat Provinsi pada Lomba Cipta Mars BKB

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun

2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang uraian tugas struktur dan fungsi organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berjumlah 75 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp2.905.715.850,00 realisasi Rp2.691.987.404,00 atau 92,64%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp381.805.100,00 realisasi Rp359.038.839,00 atau 94,04%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp693.653.000,00 realisasi Rp680.344.800,00 atau 98,08%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi Rp19.985.881,00 atau 99,93%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp142.705.000,00 realisasi Rp141.539.500,00 atau 99,18%.
- 5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp1.766.132.850,00 realisasi Rp1.580.081.510,00 atau 89,47%.
- 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi Rp12.495.750,00 atau 83,31%.



- 7) Program Pelayanan Kontrasepsi, anggaran sebesar Rp63.165.000,00 realisasi Rp52.672.820,00 atau 83,39%.
- 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp715.818.000,00 realisasi Rp705.749.854,00 atau 98,59%.
- 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat, anggaran sebesar Rp12.000.000,00 realisasi 11.695.000,00 atau 97,46%.
- 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, anggaran sebesar Rp255.200.000,00 realisasi Rp251.721.700,00 atau 98,64%.
- 11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, anggaran sebesar Rp40.200.000,00 realisasi Rp40.189.970,00 atau 99,98%.
- 12) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu, anggaran sebesar Rp38.200.000,00 realisasi Rp37.380.000,00 atau 97,86%.

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berawal dari penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan (, desa, kecamatan, masyarakat, forum anak kecamatan dan LSM) yang ditunjang dengan data yang sudah terinventarisasi. Kompilasi data ini digunakan sebagai dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan dalam rapat kerja daerah di BKKBN DIY, guna mensinkronkan program kabupaten dan provinsi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan adalah sebagaimana terlampir.



h. Permasalahan dan Solusi

1. Masih tingginya angka *Unmet Need*/Pasangan Usia Subur yang seharusnya menjadi peserta KB namun belum menjadi peserta KB. yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*). Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan peran kader KB dan meningkatkan pelayanan KB bagi PUS.
2. Ada kecenderungan peningkatan jumlah pernikahan dini. Solusi yang dilakukan meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran kesehatan reproduksi remaja dan sosialisasi pencegahan pernikahan dini.
3. Masih rendahnya produktifitas dan pengembangan usaha keluarga . Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan akses bantuan modal bagi keluarga miskin dan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan manajemen usaha, memperluas jaringan pemasaran, memperbanyak gelar pameran potensi UPPKS dan melakukan penguatan kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP).

16. Urusan Perhubungan

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor



-
- m) Pengelolaan dokumen SKPD
 - n) Penyediaan jasa langganan
 - 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
 - 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Pengkajian kompetensi kepegawaian
 - 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil SKPD
 - e) Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD
 - 5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - a) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
 - b) Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - c) Inventarisasi LPJU
 - 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a) Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU
 - b) Operasi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
 - 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
 - b) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
 - c) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
 - d) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 - e) Forum manajemen Lalu Lintas
 - 8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas



- b) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
 - c) Penyelenggaraan perparkiran
 - d) Survey Rekayasa Lalu lintas
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- a) Pengadaan alat uji kendaraan bermotor
 - b) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
 - c) Pelayanan uji kendaraan bermotor
 - d) Pembinaan perbengkelan
 - e) Perawatan alat uji kendaraan bermotor

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perhubungan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a) Pelayanan surat menyurat menyurat dan pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan.
 - b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak dan koneksi internet 12 bulan.
 - c) Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang 19 orang 12 bulan
 - d) Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor 7 orang serta penyediaan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan.
 - e) Perbaikan peralatan kerja 5 unit mesin ketik dan 10 unit komputer selama 12 bulan
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 jenis.
 - h) Penyediaan 9 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat, dan *extra fooding* untuk 3 bidang selama 12 bulan.



- k) Rapat koordinasi dan konsultasi 23 kali.
- l) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan.
- m) Pengelolaan dokumen SKPD selama 12 bulan
- n) Penyediaan jasa langganan selama 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin bangunan kantor 3 unit.
 - b) Operasional dan pemeliharaan 14 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 .
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimtek dan *workshop* 4 kali.
 - b) Penilaian angka kredit bagi 13 PNS pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, pengelolaan administrasi kepegawaian 104 PNS, dan 5 PTT.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan
 - a) Laporan bulanan 12 buku, laporan tahunan 1 buku dan LAKIP 1 buku
 - b) Verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan, penyusunan laporan keuangan 2 buku, konsinyering 4 kali
 - c) Rencana Kerja SKPD, RKA, DPA, DPPA dan Program Kerja 10 buku.
 - d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan dinas 35 kali.
 - e) Data base dan Profil SKPD 50 buku
- 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - a) Pengelolaan terminal angkutan darat 5 unit
 - b) Pembangunan LPJU 449 titik.
 - c) *Data base* LPJU 1 dokumen.
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - a) Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU 2.250 titik.
 - b) Operasional pemeliharaan fasilitas lalu lintas berupa rambu 233 unit.



7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a) Uji kelayakan angkutan wisata sekolah di 400 sekolah.
- b) Monitoring kendaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 35.000 kendaraan.
- c) Perijinan angkutan 20 ijin.
- d) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 240 kali, sosialisasi tertib lalu lintas 15 kali, kampanye tertib lalu lintas 15 kali.
- e) Forum manajemen lalu lintas 35 kali.

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

- a) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas 107 unit, pengecatan marka jalan 3.390 m², pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan Jalan (RPJJ) 42 unit, pemasangan cermin cembung 70 unit dan peraga pengatur lalu lintas 100 unit
- b) Pembangunan Pagar pengaman jalan sepanjang 50 m².
- c) Penerbitan izin parkir 17 lokasi.
- d) Survey 20 ruas jalan dan survey geometri Simpang 5 lokasi.

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan.

- a) Pengadaan 1 paket alat uji kendaraan bermotor
- b) Uji emisi pada 500 kendaraan umum dan kendaraan dinas.
- c) Pelayanan pengujian 19.020 kendaraan bermotor.
- d) Pembinaan perbengkelan bagi 75 bengkel.
- e) Perawatan 9 unit alat uji kendaraan bermotor.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana buku lampiran)

Perkembangan hasil-hasil pembangunan urusan perhubungan selama 3 tahun dapat terlihat sebagai berikut:

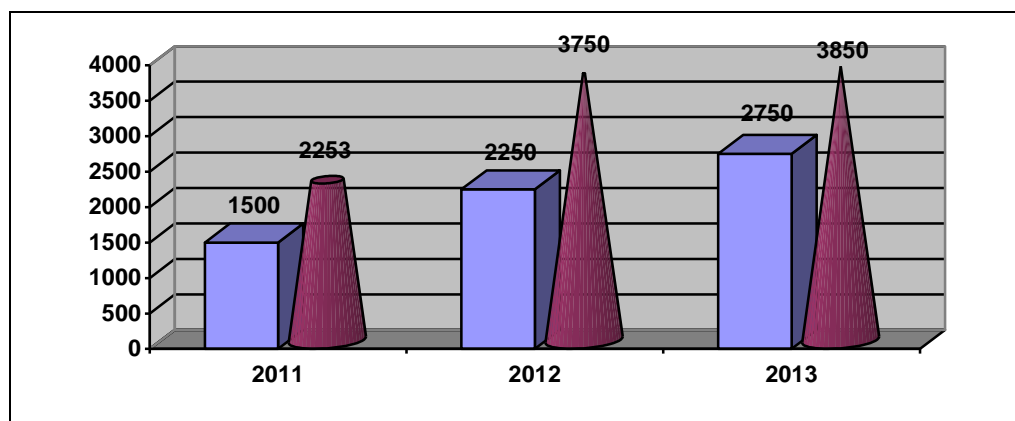
Tabel 3.36. Data Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perhubungan Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU (titik)	390	450	525
2.	Jumlah pemasangan LPJU:			
	- Lampu TL 40 watt	815	800	725
	- Lampu mercury 125 watt	1.149	1.160	1.196
	- Lampu mercury 250 watt	2.087	2.097	3.050
	- Lampu natrium 250 watt	6.725	7312	7.236
3.	Jumlah pemeliharaan lampu LPJU (titik)	2.250	4.160	4.350
4.	Jumlah pemasangan KWH meter (klp)	20	8	23
5.	Pemeliharaan rutin LPJU (buah)	2.253	3.750	3.850
6.	Jalan strategis terlayani LPJU yang terpasang	98%	99,1%	99,3%

Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2013 telah dilakukan pemeliharaan jaringan LPJU sebanyak 525 titik, dan pemasangan 347 titik LPJU meningkat 5,5% dari 329 titik pada tahun 2012. Pemeliharaan LPJU juga meningkat dari titik 4.160 menjadi 4.350 atau naik sebesar 4,6%. Kegiatan pemeliharaan LPJU menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat grafik sebagai berikut :

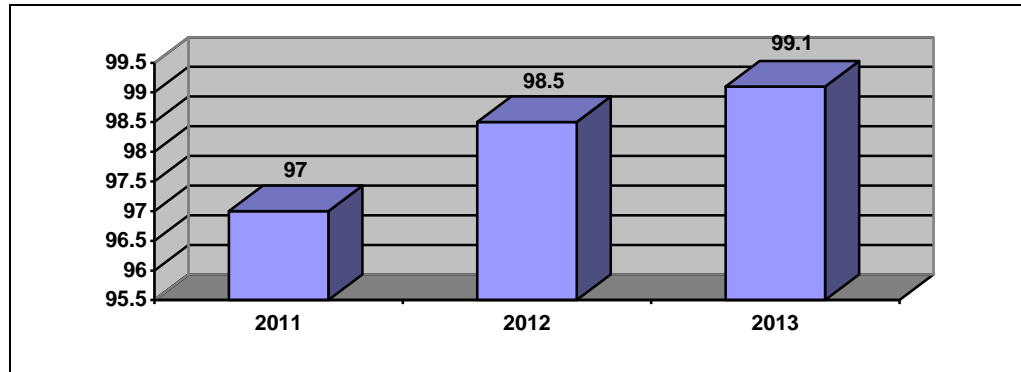
Grafik 3.27. Target dan Realisasi Pemeliharaan Rutin LPJU 2011-2013



Sumber: Dinas Hubkominfo

Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan. Pada tahun 2013 hampir semua jalan negara dan jalan provinsi telah terlayani lampu penerangan jalan yakni mencapai 99,3% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.28. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2011-2013 (dalam prosentase)



Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2013 jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari 4.779.060 penumpang menjadi 4.254.314 penumpang. Angkutan umum yang memanfaatkan fasilitas Terminal Jombor menurun dari 179.115 kendaraan umum menjadi 166.028 kendaraan. Penurunan ini terutama terjadi pada Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan angkutan pedesaan.

Dibandingkan tahun 2012, jumlah AKAP menurun 5,2% dari 35.417 unit menjadi 33.562 unit, jumlah AKDP menurun 7,3% dari 90.633 unit menjadi 84.056 unit, sedangkan angkutan pedesaan mengalami penurunan 8,46% dari 29.847 kendaraan menjadi 24.345 kendaraan. Di sisi lain angkutan perkotaan meningkat dari 23.218 kendaraan menjadi 24.345 armada kendaraan.

Untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari 200 unit menjadi 260 unit, pengecatan marka jalan sepanjang 1.000 m², menambah cermin tingkungan 10 unit dan *traffic cone* 100 unit, pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) 25 unit dan *delineator* 330 unit.



Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37. Data Tempat Parkir dan Tukang Parkir Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Tempat parkir	229	232	298
2.	Tukang parkir	516	553	676

Sumber: Dinas Hubkominfo

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan lokasi parkir meningkatkan pula pendapatan daerah dari retribusi parkir. Pada tahun 2013 retribusi parkir meningkat 92,95% dari Rp431.405.000 menjadi Rp832.399.000.

Untuk menjamin keamanan dan kelaikan jalan, maka telah dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi 2.904 kendaraan umum dan 16.116 kendaraan bukan umum. Pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan umum mengalami kenaikan sebesar 2,3%, dari 2.839 unit pada tahun 2012 menjadi 2.904 unit pada tahun 2013. Sedangkan pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan bukan umum mengalami kenaikan 1,1%, dari 15.945 unit pada tahun 2012 menjadi 16.116 unit pada tahun 2013, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.38 Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2011-2013

No	Uraian Mobil	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum
1.	Penumpang	564	-	91	4	48	-
2.	Taxi	-	-	414	-	401	-
3.	Bus	1.381	126	1.408	86	1.348	89
4.	Pick Up	-	11.141	-	12.001	1	12.188
5.	Truck	119	4.285	922	3.829	1.104	3.815
6.	Tangki	-	4	2	2	1	1
7.	Kend. Gandeng	-	3	-	4	1	4
8.	Kend. Tempel	-	13	2	15	-	15
9.	Kend. Khusus	-	4	-	4	-	4
Jumlah		2.064	15.577	2.839	15.945	2.904	16.116

Sumber: Dinas Hubkominfo

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perhubungan di Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 104 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perhubungan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp14.941.330.000,00 realisasi Rp13.865.193.387,00 atau sebesar 92,80%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.535.345.000,00 realisasi Rp1.402.956.013,00 atau 91,57%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp747.537.000,00 realisasi Rp676.739.519,00 atau 90,53%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp58.145.000,00 realisasi Rp52.882.400 atau 90,95%



- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp169.725.000,00 realisasi Rp154.258.000,00 atau 90,89%
- 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, anggaran sebesar Rp3.338.912.100,00 realisasi Rp3.139.225.500 atau 94,02%
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.245.651.000,00 realisasi Rp2.163.383.630,00 atau 96,34%
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar Rp357.805.000,00 realisasi Rp351.470.025,00 atau 98,23%
- 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp2.188.713.000,00 realisasi Rp2.144.159.400 atau 97,96%
- 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar Rp4.299.496.900,00 realisasi Rp3.777.118.800,00 atau 87,85%

f. Proses Perencanaan

Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan *survey* kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh dari hasil *survey* disusun rencana kerja. Untuk menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan penumpang dan perguruan tinggi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana terlampir.



h. Permasalahan dan Solusi

1. Penurunan jumlah angkutan umum di luar angkutan perkotaan.
Solusinya memberikan pemerataan laur gemuk penumpang di setiap jalur angkutan non perkotaan khusus pedesaan.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - a) Pengembangan dan Operasional LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
 - b) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 - c) Pelayanan informasi berbasis SIM *Call Center*
 - d) Pengelolaan dan pengembangan VoIP kecamatan
 - e) Pemasangan sub PABX dan jaringan ekstension VoiP.
 - f) Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
 - g) Pengelolaan dokumentasi kegiatan dan data pemkab
 - h) Pengelolaan website
 - i) Penerbitan suara parlemen, booklet, leaflet, buletin
 - j) Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers, dialog interaktif dan keprotokolan.
 - k) Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan
 - l) Keprotokolan dan layanan aspirasi masyarakat
 - m) Pengkajian dan pengembangan SIM
 - n) Penyusunan Buku Informasi Pembangunan
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
 - a. Pengkajian penggunaan media serta monitoring issue dan permasalahan melalui media massa



b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a) Operasional jaringan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa 12 bulan.
- b) Pelayanan operator telepon/rakom 24 jam, faksimile, dan perbaikan telepon selama 12 bulan, monitoring jaring komunikasi di 17 kecamatan, terpeliharanya central PABX 24 jam, bantuan komunikasi pada 5 even penting Pemkab selama tahun 2013, chek up SDM Santel 10 orang
- c) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi 12 bulan, peningkatan kemampuan SDM dalam layanan sistem informasi bagi 3 orang.
- d) Penggantian pesawat telepon single line di kecamatan 20 unit, penggantian jaringan IKR (PVC 2x20,6mm) 20 roll, pemeliharaan komunikasi melalui telepon ekstension VoIP di kecamatan 12 bulan, peningkatan SDM di kecamatan tentang teknologi Voip 17 orang.
- e) Persandian informasi melalui jaringan telekomunikasi, koordinasi persandian lintas daerah bagi 40 orang, seminar/workshop security jaringan 3 orang.
- f) Dokumentasi kegiatan Pemkab (foto, CD, kaset rekaman), pengelolaan data pembangunan 12 bidang dan pengelolaan dokumen berita dari 108 media cetak selama 12 bulan.
- g) Pengelolaan *website/subdomain* Bappeda, Dinas Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral , Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, updating data di web Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selama 12 bulan, update info perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan, informasi kepegawaian



secara on line di Badan Kepegawaian Daerah, informasi KORPRI di Sekretariat KORPRI.

- h) Majalah Suara Parlemen 4.000 eksemplar, 400 booklet, 1.000 leaflet, 1.000 buletin, dan 100 buku kerja, dan bulletin KORPRI 150 eksemplar.
- i) Dialog interaktif di televisi 16 kali, dan publikasi/peliputan di 9 media, orientasi jurnalistik 2 kali.
- j) Pelayanan informasi tentang DPRD melalui internet dan anjungan 2 paket.
- k) Pelayanan keprotokolan bagi anggota dewan dan layanan aspirasi masyarakat 12 bulan
- l) Buku Informasi pembangunan 175 buku.
- m) Penambahan modul monev pada SIMRENDANA dan pemeliharaan SIMRENDANA selama 12 bulan.

- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi terealisasi monitoring berita di media massa pada 125 media massa lokal dan identifikasi permasalahan masyarakat dan kritikan terhadap Pemkab melalui media 12 dokumen masalah dan kritikan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.39. Pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika

N o	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Capaian 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Angku tan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	52,38%
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%	2014	100%
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	100%
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dan trayek	40%	2014	17,24%
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota angkutan umum dan trayek	60%	2014	59,52%
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	2014	100%

1	2	3	4	5	6	7
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	68,75%
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	100%
			9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40%	2014	56,57%
			10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	50%
		6 Keselamatan	11 Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%	2014	100%

Sumber: Bagian Organisasi, Setda

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika telah memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta memperlancar penerapan *e-government* di Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2013 telah ditambah 1 unit IP PABX berbasis VoiP menjadi 340 unit. Selain itu telepon ekstension VoIP juga dikembangkan dengan menambah 12 saluran ekstension di 3 kecamatan.

Perkembangan teknologi informatika telah mampu mendukung terwujudnya *e-gov* di Sleman. Sub domain yang telah dibuat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh informasi dalam segala bidang.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *on line*. Perkembangan teknologi informatika telah mendukung pelaksanaan *e-gove* di Kabupaten Sleman. Portal www.slemankab.go.id, dan sub domain SKPD terus dikembangkan. Perkembangan bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.40. Perkembangan Bidang Komunikasi dan Informatika 2011-2013

No	Uraian	TAHUN		
		2011	2012	2013
1.	Website	1	1	1
2.	Domain utama/sub domain	44	45	45
3.	Infrastruktur/WA (lokasi)	62	62	92
4.	Intranet/LAN	630	630	750

Pelayanan data dan informasi juga ditingkatkan dengan diterbitkannya 4500 eksemplar majalah Suara Parlemen, dan 100 eksemplar buletin KORPRI yang berisi informasi tentang kegiatan DPRD Sleman dan KORPRI. Selain itu juga melalui leaflet 1500 eksemplar dan booklet 1500 eksemplar, dan video selang pandang DPRD serta buku Informasi pembangunan 175 eksemplar.

Pengembangan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 telah memperlancar pengadaan barang dan jasa. Melalui jaringan LPSE dengan alamat <http://lpse.slemankab.go.id> semua instansi telah melaksanakan pengadaan barang melalui LPSE. Layanan ini untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, mendukung persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar sampai dengan tahun 2013 adalah 2.827 sedangkan yang terverifikasi 2.684. Paket lelang *e-Proc* 262 paket dan yang terselesaikan 262 paket. pekerjaan yang terdiri dari 248 paket pekerjaan dari Pemkab Sleman, 2 paket pekerjaan dari BPN, dan 9 paket pekerjaan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, 1 paket pekerjaan dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kerja, 1 paket pekerjaan dari Balai Karantina Kelas II Yogyakarta, dan 1 paket pekerjaan dari Pengadilan Negeri Kelas IB. Nilai 262 paket pekerjaan tersebut adalah Rp244.500.000.000,-. Sedangkan paket lelang pekerjaan yang tidak melalui *e-proc* pada tahun 2013 berjumlah 2 paket pekerjaan dengan nominal Rp447.269.000,00 yaitu 1 paket rehabilitasi jaringan irigasi di Sempu Kecamatan Turi I dan 1 paket rehabilitasi jaringan irigasi di Sempu II Kecamatan Turi. Prosentase *e-proc* 99,2% lebih besar dari pada non *e-proc* 0,8%.

Untuk memperoleh bahan rumusan kebijakan pemerintah, telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan identifikasi permasalahan di media massa. Melalui kegiatan ini kritikan yang dimuat di media massa, buku tamu di website slemankab.go.id dan prsleman@yahoo.com dapat diidentifikasi dan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan upaya ini keluhan masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunkaga Kerja dan Sosial dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan komunikasi dan informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berjumlah 30 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp1.523.379.250,00 realisasi Rp1.444.930.316,00 atau 94,85%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.508.719.250,00 terealisasi Rp1.430.670.316,00 atau 94,83%
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran sebesar Rp14.660.000,00 terealisasi Rp14.260.000,00 atau 97,27%.

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam penyusunan perencanaan juga senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir

h. Permasalahan dan Solusi

Belum semua penyedia jasa di Kabupaten Sleman mempersiapkan diri untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui system pengadaan secara elektronik (PSE). Solusi nya mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada Pengguna Anggaran dan penyedia barang dan jasa untuk mempergunakan aplikasi pengadaan secara elektronik.